

Laporan Tahunan 2023-2024

Lingkar Temu Kabupaten Lestari



Sambutan Ketua Umum LTKL



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu, Namu Buddhaya, dan Salam Kebajikan.

Satu tahun perjalanan yang telah dilalui dengan adanya dinamika, peluang dan tantangan yang kita hadapi dalam masa transisi beberapa kabupaten yang juga sedang berganti masa pemerintahan. Penting bagi kita untuk menyelaraskan kerja di bawah semangat kolaborasi Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL), asosiasi kabupaten yang bertujuan mewujudkan transformasi kabupaten dengan visi pembangunan ekonomi yang inovatif melalui gotong royong multipihak dalam rangka menjaga hutan dan ekosistemnya serta memastikan kesejahteraan masyarakat di kabupaten.

Kita telah melewati Fase Mengakar (2017-2023) dengan menetapkan visi target, dan strategi untuk 2030, hingga disepakati Target LTKL 2030 sebagai target bersama kabupaten anggota pada Rapat Umum Anggota (RUA) 2020 yang lalu. LTKL menggunakan pendekatan ekonomi lestari dengan mendorong model 'Ekonomi Lestari' yang merupakan manifestasi visi kabupaten anggota LTKL melalui pengembangan inovasi basis alam dan pengembangan produk turunan dari beberapa komoditas strategis kabupaten.

Saat ini, LTKL memasuki Fase Tumbuh yang bertujuan untuk menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan, kemitraan dan kapasitas ekosistem LTKL untuk mencapai target 2030. Fokus utama LTKL pada fase ini adalah penguatan sumber daya manusia di kabupaten, sebagai salah satu faktor pemungkin (*enabler*) krusial dalam pencapaian target LTKL 2030. Fase ini, LTKL akan berfokus pada penguatan dan pembuktian adanya "*proof of concept*" dalam mendorong transformasi kabupaten yang memiliki model pengembangan ekonomi berbasis industri konvensional dan inovasi basis alam dengan intervensi kolektif melalui lima pilar: (I) kebijakan, (II) perencanaan, (III) tata kelola multipihak, (IV) pemantauan, pelaporan dan komunikasi, dan (v) aksi bersama dalam bentuk inovasi dan investasi. Seperti halnya dalam sebuah fase pertumbuhan, LTKL bersama ekosistem yang berjalan dalam bentuk kolektif ini perlu memiliki kesiapan dan amunisi agar kabupaten dapat berdaya dan secara aktif membuktikan diri sebagai kabupaten lestari.

Tahun lalu, kita menghadapi fenomena El-Nino yang menyebabkan kekeringan dan kebakaran di beberapa daerah di Indonesia termasuk kabupaten anggota kita. Pasar global kini juga menuntut komoditas bebas deforestasi, memiliki legalitas serta ketelusuran yang jelas. Kondisi kabupaten saat ini, mengalami dampak besar, sehingga LTKL bersama mitra pembangunan mempersiapkan daerah menghadapi tantangan global ini. Melalui pendalaman strategi dengan memastikan 'ambang batas' lingkungan pada kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar individu, mengurangi dampak negatif dan mengurangi ketergantungan praktik monokultur, dengan fokus pada pengembangan komoditas potensial seperti Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) melalui agroforestri dan pertanian regeneratif.

LTKL dan mitra pembangunan membuka peluang insentif baik publik maupun non-publik. Beberapa kabupaten sedang dalam proses mengakses insentif, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sifatnya tematik hingga Dana Bagi Hasil (DBH) baik dana reboisasi maupun spesifik untuk perkebunan sawit juga sedang didorong lebih optimal agar implementasi dana ini dapat membantu capaian dan dampak yang lebih luas di kabupaten.

Kemajuan berkelanjutan yang sejalan dengan agenda nasional perlu dipantau dan dilaporkan. Tahun 2024 ini, LTKL secara organisasi juga menjadi bagian dari tim teknis dalam Dasbor Nasional dalam mekanisme kesiapan komoditas strategis Indonesia dalam pasar global yang difasilitasi oleh lintas kementerian/ lembaga, dan beberapa kabupaten anggota mendapatkan kesempatan untuk menjadi lokasi pilot untuk implementasi program nasional tersebut bersama perusahaan komoditas terkait.

Kolaborasi multipihak di tingkat tapak terus didorong agar lebih holistik, melibatkan dan mengoptimalkan peran swasta bersama kabupaten melalui pengembangan resep skema tata kelola multipihak kabupaten melalui kolaborasi mitra kabupaten dan kelembagaan multipihak yang ada di kabupaten. Tahun 2024 akan menjadi tahun dinamis dengan masa transisi pemerintahan di level pusat maupun daerah, yang akan mempengaruhi kebijakan dan keberlanjutan program. Pada bulan Oktober 2023 lalu, Sekretariat LTKL melakukan *workshop* untuk sentra di kabupaten anggota LTKL untuk menyepakati strategi, fungsi dan peran dari tim lokal saat ini. Sentra merupakan entitas dengan anggota orang muda lokal, serta memiliki beberapa fungsi berdasarkan *cluster*-nya, yakni: (I) Kemitraan multipihak, (II) Generasi lestari, dan (III) Rantai pasok gotong royong. Awal 2024, Sekretariat LTKL menjalankan *roadshow* ke kabupaten anggota dan jejaring mitra utama untuk bersinergi dan memetakan program serta inisiatif di berbagai tingkat.

Secara keseluruhan, perjalanan kita satu tahun terakhir patut kita syukuri. Harapannya, program yang telah berjalan tahun lalu dapat terus berlanjut dengan baik. Namun, perjalanan masih panjang. Semangat dan kinerja baik ini harus terus dijaga dan ditingkatkan, dengan fokus lebih besar pada implementasi program-program di tingkat tapak. Terima kasih atas kerja keras dan komitmen semua pihak yang telah bekerja bersama LTKL. Mari kita lanjutkan kerja baik kita untuk mewujudkan visi misi kita di tahun 2030.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Shanti Shanti Shanti Om, Namu Buddhaya

Sintang, 27 Juni 2024


dr. H. Jarot Winarno, M.Med.Ph
Bupati Kabupaten Sintang & Ketua Umum LTKL

Sambutan Ketua Umum APKASI



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.*

Sejak APKASI Otonomi Expo 2017, kami ikut mendorong terbentuknya Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL), sebuah kaukus pemerintah kabupaten yang kini memiliki 9 kabupaten anggota yang tersebar di 6 provinsi di Indonesia. Pada tahun 2021, APKASI ditunjuk sebagai salah satu Dewan Pengawas LTKL. Melalui forum ini, LTKL bergotong-royong membantu kabupaten anggota menyusun strategi peningkatan kapasitas dan mendapatkan insentif atas upaya pembangunan lestari, dengan dukungan dan kolaborasi dengan APKASI.

Tahun 2024 ini APKASI memiliki empat program besar: (I) Fasilitasi pengembangan kapasitas daerah, (II) Program tahunan, seperti APKASI

Procurement Network dan APKASI Otonomi Expo, serta (IV) program internal kesekretariatan. Kami bersama LTKL sepakat untuk mendorong percepatan ekonomi kabupaten dan memperkuat otonomi daerah melalui program bersama dan membentuk tim bersama antara LTKL dan APKASI. Melalui narasi ekonomi hijau yang telah berkembang sebagai konsep pemulihan ekonomi yang berkelanjutan, kami mendorong perlindungan lingkungan serta pengembangan ekonomi yang ramah lingkungan dan sosial sesuai dengan target nasional untuk meningkatkan daya saing daerah.

Sebagai bagian dari ekosistem pendukung LTKL, kami berkomitmen untuk dapat mereplikasi resep pembangunan lestari ke seluruh kabupaten di Indonesia. Sehingga untuk memperkuat tujuan tersebut, APKASI dan LTKL menandatangani MoU pada Juli 2023 yang berlangsung hingga Juli 2026. Kerjasama ini mencakup pembentukan Tim Bersama untuk memperkuat koordinasi dan implementasi program bersama melalui: (I) Peningkatan kapasitas pemerintah kabupaten, (II) penguatan narasi ekonomi hijau dalam perencanaan dan kebijakan nasional dan daerah, serta (III) Penguatan advokasi untuk insentif fiskal berbasis kinerja berkelanjutan.

Selain itu, untuk mendorong pertumbuhan dan penguatan UMKM lokal berbasis alam dalam pengadaan barang dan jasa berkelanjutan, LTKL menjadi mitra pendukung dalam APKASI Procurement Network 2023 yang diselenggarakan di Jakarta pada November 2023 yang lalu. Forum ini adalah agenda strategis tahunan yang menghubungkan pemerintah daerah, kementerian, lembaga non-kementerian, serta penyedia barang dan/atau jasa yang produknya telah terdaftar di e-katalog. LTKL turut berpartisipasi dengan menampilkan Gerai Kabupaten Lestari dan merumuskan *Policy Brief* serta Peta Jalan Pengadaan Barang dan Jasa Berkelanjutan sebagai panduan kebijakan.

Melangkah ke depan, dalam rangka penguatan otonomi daerah dan transformasi, APKASI dan LTKL akan menentukan strategi kebijakan inovatif untuk sebagai *safeguard*/pelindung bagi upaya transformasi ekonomi di kabupaten. Kami juga akan menyusun strategi advokasi dan implementasi kebijakan yang mendukung transformasi ekonomi di kabupaten, untuk menjangkau kriteria insentif publik.

Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pemerintah daerah maupun pusat, untuk berpartisipasi aktif dalam upaya memperkuat otonomi daerah dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Kolaborasi yang telah berjalan selama setahun terakhir ini merupakan langkah penting dalam persiapan integrasi LTKL dengan APKASI di tahun 2030. Mari bersama-sama mewujudkan cita-cita ini melalui praktik baik dan menjadikan model pembangunan yang dapat diimplementasikan di seluruh kabupaten Indonesia.

Bersama, kita bisa mencapai transformasi ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing daerah secara nasional. Mari kita berkolaborasi demi masa depan yang lebih hijau dan lestari untuk seluruh kabupaten di Indonesia.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Dharmasraya, 26 Juni 2024

Sutan Riska Tuanku Kerajaan, S.E.
Bupati Kabupaten Dharmasraya & Ketua Umum APKASI

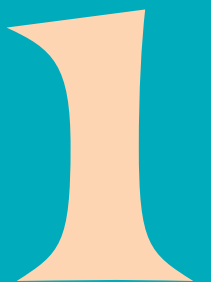
Daftar Isi

1	Mengenal Lebih Dekat	6	5	Aksi Kolektif	42
2	LTKL Dalam Angka	14	6	Sekretariat LTKL	50
3	Peningkatan Kapasitas berdasarkan 5 Pilar	18	7	Kemajuan Kabupaten	56
4	Insentif Publik dan Non-Publik	34			

Mengenal Lebih Dekat



- Fase Tumbuh: Transformasi Kabupaten Menuju Lestari dan Mandiri
- Tentang Lingkar Temu Kabupaten Lestari



Fase Tumbuh: Transformasi Kabupaten Menuju Lestari dan Mandiri

Di Fase Mengakar (2017-2023), LTKL menggunakan pendekatan ekonomi lestari dalam setiap narasi yang dibawakan menuju pembangunan berkelanjutan di wilayah kabupaten anggotanya. Secara terminologi, definisi 'Lestari' adalah mempertahankan yang ada dalam hal ini adalah ekosistem penting di dalamnya yaitu hutan, gambut dan lainnya. Konsep ekonomi lestari yang di awal tahun 2020 didorong adalah manifestasi dan visi kabupaten anggota LTKL yang ingin mendorong model industri hilirisasi berbasis alam dengan skema pengembangan produk turunan dari komoditas strategis kabupaten.

Mendasari kondisi tersebut, kabupaten memiliki posisi yang mengalami dampak cukup besar dan LTKL sebagai forum kabupaten perlu melihat lebih holistik dari sisi pendekatan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada skema alternatif komoditas namun juga mengurangi dampak negatif dari industri yang sifatnya ekstraktif khususnya dari perkebunan besar yang saat ini juga menjadi tumpuan ekonomi. Mengingat semua faktor ini, kabupaten anggota LTKL perlu melakukan transformasi atau perubahan ke model pembangunan yang tidak hanya 'mempertahankan' namun juga 'memulihkan'. Model ini mewakili keseimbangan antara perlindungan ekosistem, inklusi sosial, dan memastikan pertumbuhan ekonomi - sejalan dengan karya sebelumnya Kate Raworth melalui Konsep Ekonomi Donat dan konsep Pertumbuhan Hijau Sehat yang dipromosikan oleh Per Espen Stoknes yang menetapkan batas-batas planet dan pertumbuhan sebagai benteng untuk memulihkan hubungan manusia dan alam.

Transformasi ini mempertimbangkan **ambang batas ('threshold')** lingkungan dalam perancangan dan implementasi kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar semua individu untuk pengembangan dan mencapai kesejahteraan mereka tanpa terkecuali. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada ekosistem saja namun juga pada sistem sosial termasuk sumber daya manusia. Model pembangunan ekonomi yang berkelanjutan perlu dilakukan dengan memastikan kabupaten memiliki **keseimbangan dinamis** untuk mengurangi dampak negatif dan ketergantungan pada praktik monokultur industri yang sudah ada seperti minyak kelapa sawit, kayu, dan karet, yang perlu dijalankan selaras dengan mengembangkan komoditas potensial lainnya dengan model peningkatan nilai tambah, termasuk yang berasal dari hutan, seperti Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan komoditas strategis lainnya yang dilakukan melalui sistem agroforestri maupun pertanian regeneratif.

Tidak dipungkiri, waktu yang dimiliki semakin menipis untuk mencapai tahun 2030. Melalui model ini, kabupaten dapat menyiapkan kesiapannya melalui lima pilar menuju kabupaten lestari dari sisi peraturan, perencanaan, tata kelola multi pihak, inovasi dan bisnis yang berkelanjutan serta pemantauan, pelaporan dan komunikasi, sehingga kabupaten tidak hanya menunjukkan transformasi kabupaten menjadi lestari namun juga kemandirian. Bukti konkret akan terciptanya transformasi kabupaten lestari perlu ditunjukkan dengan kekuatan sumberdaya manusia yang mumpuni dari berbagai lini, baik dari pemerintah, masyarakat sipil hingga orang-orang muda yang tinggal di kabupaten tersebut.

Tentang Lingkar Temu Kabupaten Lestari

Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) adalah sebuah asosiasi pemerintah kabupaten yang dibentuk oleh representatif pemerintah kabupaten anggota dengan basis perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat melalui gotong royong. LTKL disahkan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia (APKASI) pada tanggal 21 Juli 2017 sebagai kaukus pembangunan lestari untuk pemerintah daerah.

Visi

Mewujudkan Visi Ekonomi Lestari sebagai model pembangunan Indonesia

Misi

Kabupaten LTKL memiliki misi untuk mencapai implementasi ekonomi lestari melalui gotong royong dengan basis lima pilar secara efektif untuk melestarikan 50% hutan, gambut, dan ekosistem penting lainnya serta meningkatkan kesejahteraan 1 juta keluarga di sekitar ekosistem tersebut. Sehingga, resep tersebut dapat direplikasikan di kabupaten lainnya dan dapat diadopsi secara nasional.

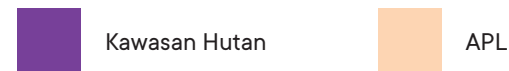
Target LTKL 2030

Pada Rapat Umum Anggota (RUA) 2021 telah dideklarasikan Visi Kabupaten Lestari 2030 oleh kabupaten anggota untuk bergotong royong dengan para pihak lintas sektor untuk mencapai:

- Berhasil menjaga lima puluh persen (50%) hutan, gambut, dan ekosistem penting; serta mensejahterakan 1 juta keluarga di kabupaten anggota LTKL
- Berhasil mengembangkan jejaring gotong royong pembangunan lestari multipihak
- Berhasil menyusun 'resep' pembangunan lestari yang dapat direplikasi oleh seluruh kabupaten di Indonesia

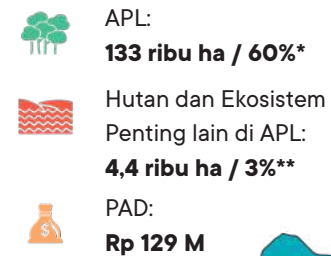
Profil Kabupaten Anggota

Saat ini LTKL memiliki 9 kabupaten anggota di 6 provinsi di Indonesia, dan bekerja berdampingan dengan 56 jejaring mitra yang terhubung dengan program bersama kabupaten dan 26 mitra lainnya merupakan jejaring mitra utama yang tergabung sebagai mitra utama LTKL dalam membantu capaian target 2030.



*% Luas APL terhadap luas kabupaten
 ** % Luas hutan dan ekosistem lainnya terhadap APL kabupaten

Kab. Aceh Tamiang



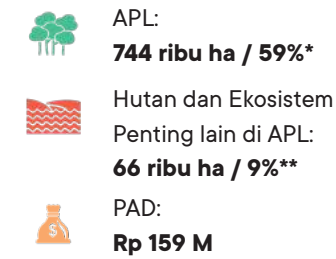
Kab. Siak



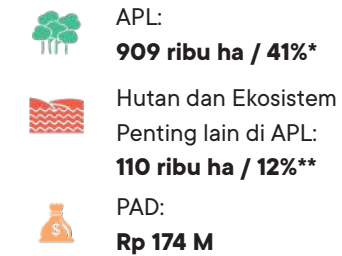
Musi Banyuasin



Kab. Sanggau



Kab. Sintang



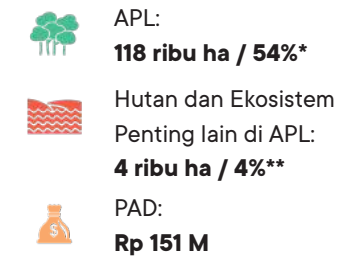
Kab. Kapuas Hulu



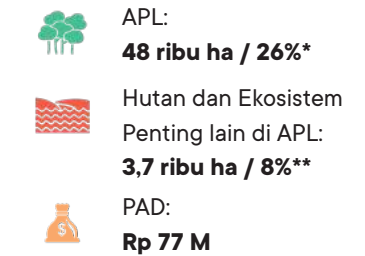
Kab. Sigi



Kab. Gorontalo



Kab. Bone Bolango

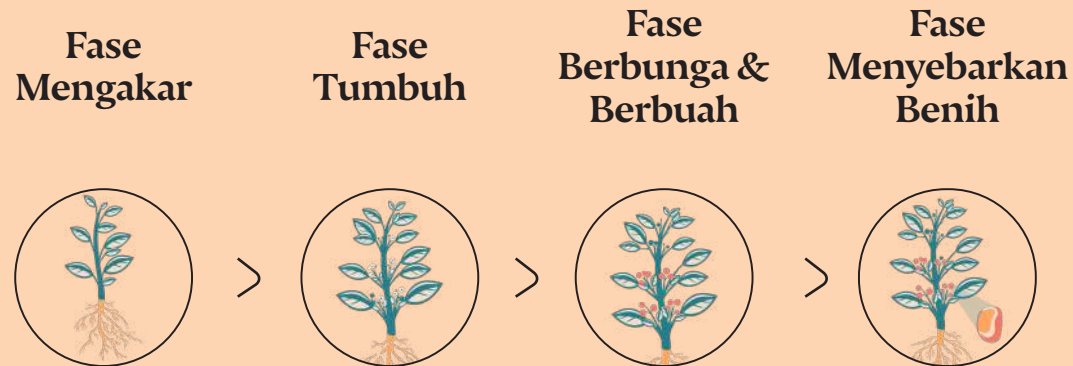


Sumber Data:

Peta tutupan lahan KLHK 2022, Peta Kawasan Hutan KLHK 2023, Peta Kesatuan Hidrologis Gambut KLHK 2023
 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Dalam Angka, BPS 2024

Fase Perkembangan Menuju Kabupaten Lestari

Sebagai peta jalan menuju Target LTKL 2030 ini, maka disusunlah empat fase perkembangan.



2017 - 2023

Menemukan, menyatukan, dan memutuskan visi, target dan strategi untuk 2030

2023 - 2026

Menumbuhkan dan memperkuat kelembagaan, kemitraan dan kapasitas pondasi dari LTKL dengan arah yang jelas untuk mencapai target 2030

2026 - 2028

Memastikan kabupaten mendapatkan insentif karena mengadopsi resep pembangunan lestari dengan sukses

2028-2030

Membangun kolaborasi agar semua daerah di Indonesia dapat mengadopsi resep pembangunan lestari dengan sukses



Untuk menjalankan operasional asosiasi, dibentuk Sekretariat LTKL sebagai bagian dari 'backbone' yang berperan untuk merangkai gotong royong dalam membantu capaian target 2030 dengan 3 fungsi:



Menghubungkan Jejaring Mitra



Membuka Peluang Insentif



Membantu Peningkatan Kapasitas Daerah Berbasis Lima Pilar

- 1 Perencanaan
- 2 Kebijakan dan Peraturan
- 3 Tata Kelola Multi Pihak
- 4 Inovasi dan Investasi
- 5 Pemantauan, Pelaporan, & Komunikasi

Dalam implementasi peningkatan kapasitas berdasarkan limar pilar, saat ini telah terbentuk Tim Perumus yang merupakan tim yang dibentuk untuk membantu ketua program LTKL yang beranggotakan perwakilan kabupaten anggota dan jejaring mitra utama dalam menyusun strategi pilar implementasi kabupaten lestari.



LTKL Dalam Angka



2

Ekosistem Penting Yang Dilindungi

● **361.309,61** ha
tersebar di 9 kabupaten dalam bentuk reforma agraria telah dilegalisasi peraturan reforma agraria

● **80.596,61** ha
tersebar di 7 kabupaten dalam bentuk peraturan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B)

Dampak Kesejahteraan di Dalam Rantai Pasok Berkelanjutan

● **9** kabupaten
telah mengintegrasikan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045

● **3** kabupaten
telah mengarahkan kebijakan ke Investasi Lestari dalam dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)

● **66** katalog produk lestari
telah terkurasi dan dikembangkan melalui kegiatan sentra inkubasi di 5 kabupaten

● **91** UMKM lestari
telah didampingi melalui program inkubasi di 5 kabupaten

● **243** program bersama
dihasilkan sentra kemitraan multipihak di 7 kabupaten

● **298** orang muda
sudah terhubung dengan *green jobs* di 7 kabupaten

Insentif Publik dan Non-Publik Yang Diterima Kabupaten

● **+ Rp1,63** miliar
insentif non publik didapatkan oleh masing-masing 2 sentra produksi dan inkubasi

● **+ Rp57** miliar
telah berhasil diakses oleh 3 kabupaten dalam bentuk insentif publik (DAK, DID dan DBH) untuk sektor UMKM lestari, kehutanan, perkebunan dan pertanian

● **Total pendapatan**
+ Rp654 juta
didapatkan oleh 4 pelaku usaha

● **Sejumlah Rp21** miliar
dalam bentuk valuasi kontribusi mitra pembangunan kabupaten melalui sentra kemitraan multipihak yang telah dikalkulasikan di 1 kabupaten

● **Total**
+ Rp1,73 miliar
tersalurkan untuk pengembangan 115 usaha melalui 29 program di 6 kabupaten

● **Terdapat 767** pemberitaan
dengan nilai valuasi *public relation* (PR) sebesar → Rp 99,47 miliar

Jejaring Mitra Yang Terhubung Untuk Mendukung Daerah Mencapai Kabupaten Lestari

● **56** mitra
telah terhubung dalam kerjasama multipihak di 9 kabupaten

● **8** peraturan
telah berhasil difasilitasi oleh kelembagaan multipihak di 5 kabupaten

● **2** program bersama
oleh pemerintah kabupaten dengan kementerian/lembaga terkait dengan sektor perkebunan serta pengadaan barang dan jasa berkelanjutan

Catatan:

- Saat ini, sekretariat LTKL sedang melakukan *baselining* untuk berbagai capaian kabupaten
- Dampak yang dihasilkan adalah secara langsung dan tidak langsung
- Angka ini merupakan angka kumulatif setelah penetapan target LTKL 2030

Peningkatan Kapasitas berdasarkan 5 Pilar

- Peningkatan Kapasitas Pilar Perencanaan
- Peningkatan Kapasitas Pilar Kebijakan dan Peraturan
- Peningkatan Kapasitas Pilar Tata Kelola Multipihak
- Peningkatan Kapasitas Pilar Inovasi dan Investasi
- Peningkatan Kapasitas Pilar Pemantauan, Pelaporan dan Komunikasi



3



Fokus utama LTKL dalam Fase Tumbuh ini adalah penguatan sumber daya manusia di kabupaten, sebagai salah satu faktor pemungkin (*enabler*) krusial dalam pencapaian Visi Ekonomi lestari. Fase Tumbuh akan terpenuhi ketika beberapa kabupaten anggota LTKL berhasil menunjukkan transformasi kabupaten lestari dan mandiri.

Pada Rapat Umum Anggota 2023, telah disahkan strategi dan pendekatan yang akan dilakukan selama Fase Tumbuh 2023-2026, dan tujuan tahun 2023-2026 telah ditetapkan untuk memperkuat kapasitas kabupaten anggota melalui resep lima pilar pembangunan ekonomi lestari dalam rangka mencapai target 2030. Adapun target minimal 3 Kabupaten anggota telah mengimplementasikan 5 pilar pembangunan ekonomi lestari, dengan strategi implementasi resep lima pilar, yakni perencanaan, kebijakan dan peraturan, tata kelola multipihak, inovasi dan investasi serta pemantauan, pelaporan dan komunikasi.



Peningkatan Kapasitas Pilar Perencanaan

Pilar pertama adalah pilar perencanaan yang berfungsi untuk membantu kabupaten dalam mengintegrasikan prinsip dan komitmen berkelanjutan, serta internalisasi tujuan strategis ke dalam perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD, RTRW, RDTR) di kabupaten anggota LTKL.

Kinerja Peningkatan Kapasitas Pilar Perencanaan

Implementasi Resep dan Peningkatan Kapasitas

- Sembilan kabupaten anggota LTKL dari 59 Kabupaten anggota APKASI telah menyatakan komitmennya, untuk menerapkan strategi dan kebijakan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan tanggap bencana lingkungan dalam Seminar Nasional “Tantangan Pembangunan Daerah di Tengah Fenomena Perubahan Iklim, Ancaman Bencana Lingkungan, dan Upaya Investasi Lestari” pada 4 Oktober 2023 yang diselenggarakan oleh APKASI dan KEM (Koalisi Ekonomi Membumi) di Jakarta. Komitmen tersebut dinyatakan dalam sebuah penandatanganan Deklarasi Bersama.
- Delapan kabupaten anggota LTKL dari 26 Kabupaten anggota APKASI, di antaranya Aceh Tamiang, Siak, Musi Banyuasin, Sanggau, Kapuas Hulu, Sigi, Bone Bolango, dan Gorontalo, telah mengikuti kegiatan “Strategi Pengendalian Sumber Daya Alam (SDA), Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pembangunan Sektoral Berkelanjutan” yang diselenggarakan oleh APKASI dan KEM (Koalisi Ekonomi Membumi) pada 25-26 Oktober 2023 di Jakarta. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan kapasitas dalam mengenali potensi bencana di kabupaten; pemetaan komoditas Kabupaten; dan merumuskan permasalahan dan isu lingkungan di draft Rancangan awal RPJPD Kabupaten, serta diikuti oleh Bappeda dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dari masing-masing Kabupaten.
- Tujuh kabupaten anggota LTKL (Aceh Tamiang, Siak, Sanggau, Kapuas Hulu, Sigi, Bone Bolango, dan Gorontalo) dari 18 Kabupaten anggota APKASI mengikuti pendampingan Klinik Konsultasi penyusunan RPJPD 2025-2045 yang diselenggarakan oleh KEM secara daring dari Desember 2023 hingga Juni 2024.
- Kabupaten Sintang telah melakukan penyusunan RPPLH (Rencana Pengelolaan & Perlindungan Lingkungan Hidup) secara gotong royong multi pihak, yang dilakukan bersama Bappeda, DLH, Rainforest Alliance, LTKL, USAID SEGAR, dan Universitas Tanjungpura (UNTAN). Kabupaten Sintang termasuk kabupaten pertama yang telah selesai melakukan penyusunan RPPLH di Provinsi Kalimantan Barat, didahului oleh Kota Pontianak. Dengan tersusunnya RPPLH, Kabupaten Sintang telah memiliki satu dokumen perencanaan sebagai safeguard untuk menjaga SDA dan lingkungan tetap lestari, dan rujukan penyusunan dokumen perencanaan dan regulasi lainnya.

- Melalui proses Bimtek dan Klinik pendampingan penyusunan RPJPD dan KLHS RPJPD, berhasil dikumpulkan baseline data fungsional perencana dari Bappeda kabupaten. Di beberapa kabupaten telah terpetakan tujuh potential champions berdasarkan kriteria keaktifan dalam klinik dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang sedang disusun.

Sebagai tindak lanjut dari pemetaan tersebut, Sekretariat LTKL bersama mitra tengah menyusun rencana peningkatan kapasitas untuk perencana, agar mampu menyusun rencana program dan anggaran di kabupaten yang sesuai dengan daya dukung lingkungan untuk menjaga ekosistem pentingnya. Terdapat beberapa mitra yang saat ini sudah bersinergi antara lain Rainforest Alliance (Sintang), Madani Berkelanjutan (Kapuas Hulu), Karsa Institute (Sigi).

Penyusunan Resep

- Sebagai pembeda kabupaten anggota LTKL dengan kabupaten lainnya, sudah tersedia kerangka awal model penyusunan dokumen perencanaan lestari secara multipihak. Kerangka awal ini adalah pembelajaran dari model penyusunan dokumen perencanaan yang telah dilakukan di Sintang, Aceh Tamiang, Sigi, dan Gorontalo.



Peningkatan Kapasitas Pilar Kebijakan dan Peraturan

Pilar kedua adalah Kebijakan dan Peraturan. Pilar kebijakan dan peraturan berfungsi untuk membantu menyusun usulan isu strategis dan menginternalisasi ke dalam pilar-pilar lainnya sehingga dapat menjadi 'alat' untuk pemegang kebijakan di kabupaten hingga tingkat provinsi dan nasional.

Kinerja Peningkatan Kapasitas Pilar Kebijakan dan Peraturan

Implementasi Resep

- Pada tanggal 16 - 17 November 2023 sudah dilakukan penyusunan peta jalan pengadaan barang dan jasa berkelanjutan di Kabupaten Sanggau dan Musi Banyuasin, sebagai upaya untuk mendorong kemudahan berusaha dan investasi hijau dengan mendukung UMKM berbasis alam di kabupaten, serta mendorong agar bisa masuk ke e-katalog pengadaan barang dan jasa kabupaten. Implementasi ini perlu mendorong lebih lanjut agar bisa diturunkan ke level peraturan, sementara tantangannya adalah kesediaan dari dinas terkait untuk mendorong lebih lanjut menjadi program kerja/peraturan di kabupaten masih kurang.
- Pendampingan Kabupaten Sintang dalam merumuskan rancangan peraturan pemerintahan kolaboratif (Sintang Collaborative Governance). Peraturan pemerintahan kolaboratif sudah diterbitkan dalam peraturan Bupati Sintang nomor 41 tahun 2024. Peraturan ini adalah dasar untuk melakukan kolaborasi dengan mitra pembangunan, dalam kerangka mencapai indeks kinerja utama dan tujuan pembangunan berkelanjutan di Sintang.
- Terdapat peraturan terkait kemitraan multi pihak di Kabupaten Sigi sebagai bagian dari infrastruktur pendukung, dalam implementasi pembangunan berkelanjutan dengan menekankan kolaborasi dalam mengimplementasikan Sigi Hijau.
- Pendampingan kabupaten anggota untuk mengikuti bimbingan teknis terkait strategi kebijakan pembangunan sektoral dan regional berbasis pembangunan berkelanjutan dan tanggap bencana lingkungan, yang dilaksanakan pada 22 - 23 November 2023 lalu. Tujuan bimbingan teknis ini adalah untuk memfasilitasi kabupaten dalam merumuskan, mengidentifikasi, dan menganalisis strategi kebijakan pembangunan daerah yang berbasis pada pembangunan berkelanjutan dan tanggap bencana lingkungan serta mengintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

- Tiga Kabupaten anggota LTKL (Aceh Tamiang, Siak, Sigi) mengikuti pendampingan dalam mendorong kerangka kebijakan kemudahan berusaha dan investasi hijau, melalui bimbingan teknis rantai pasok berkelanjutan yang diselenggarakan oleh KEM dan APKASI pada tanggal 23 - 25 April 2024.

Advokasi Penerapan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB)

Advokasi penerapan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) telah dilakukan di dua kabupaten. Di Kabupaten Musi Banyuasin, advokasi dilakukan dengan memberikan catatan masukan terhadap draft RAD KSB yang sedang disusun, sebagai upaya untuk memastikan implementasi yang efektif.

Sementara itu, di Kabupaten Sigi, advokasi berfokus pada tidak diterapkannya RAD KSB, mengingat kabupaten tersebut bukan daerah penghasil sawit. Upaya ini bertujuan untuk mendorong integrasi konsep keberlanjutan dalam rencana induk perkebunan kabupaten, sehingga mendukung akses insentif publik berbasis kinerja keberlanjutan bagi kabupaten-kabupaten anggota LTKL.

Pendampingan Dana Alokasi Khusus Non-fisik (DAK Non-fisik)

LTKL telah melakukan pendampingan penggunaan DAK non-fisik di Kabupaten Sigi dan Kabupaten Gorontalo. Fokus di Kabupaten Sigi, mendampingi Sentra Inkubator Gampiri Interaksi agar dapat mengakses dan mengelola DAK Non-Fisik untuk peningkatan kapasitas UMKM. Namun perlu lebih jauh menetapkan bentuk atau status Gampiri sebagai lembaga inkubator.

Sementara di Kabupaten Gorontalo, pendampingan pemanfaatan DAK Non-Fisik untuk Sentra Industri Kecil Menengah (IKM) dan UMKM. Salah satunya melalui tawaran program yang diberikan agar bisa menyerap anggaran DAK Non - Fisik Kabupaten Gorontalo.



Peningkatan Kapasitas Pilar Tata Kelola Multipihak

Kelembagaan multipihak di kabupaten berfungsi sebagai wadah kolaborasi multipihak dalam mendorong target bersama di tingkat kabupaten, termasuk berperan sebagai 'perangkai' dan 'fasilitator' dalam mempersiapkan kemandirian transformasi kabupaten lestari.

Kinerja Peningkatan Kapasitas Pilar Tata Kelola Multipihak

Penyusunan Pedoman Pelibatan Multipihak di Kabupaten

- Penyusunan resep kemitraan multipihak di Kabupaten Aceh Tamiang, Siak dan Sintang telah dilakukan bersama Proforest dan beberapa kolaborasi dengan perusahaan. Resep ini difasilitasi oleh Kelembagaan Multipihak di tiga kabupaten tersebut dalam melakukan asesmen dari sisi tata kelola multipihak, penentuan topik strategis, hingga mekanisme akses pendanaan yang dilakukan secara kolektif.
- Sebagai wadah kolaborasi multipihak, kabupaten harus mengeluarkan dokumen kumpulan portofolio berbasis yurisdiksi dan komoditas yang dilakukan secara kolektif dan difasilitasi oleh kelembagaan multipihak. Tahun 2022 yang lalu, Kabupaten Siak telah mengeluarkan Siak Investment Outlook dan tahun 2024 ini Kabupaten Sigi berproses untuk menyusun Sigi Investment Outlook yang didukung oleh Landscape Indonesia dan Tropical Forest Alliance.

Sentra Kemitraan Multipihak Sebagai Forum Penghubung Kolaborasi Daerah

- Pertemuan Kemitraan Multi Pihak Sigi pada tanggal 11 Juni 2024 dilakukan sebagai upaya menguatkan kolaborasi pemerintah kabupaten dan mitra di Sigi. Pertemuan ini menghasilkan capaian penyelarasan pemahaman terkait KMP Sigi Hijau, pemetaan kinerja OPD dan mitra sesuai dengan keahliannya dalam mendukung kerja bersama di KMP Sigi Hijau, dan kesepakatan tentang komitmen/tindak lanjut yang diperlukan untuk mendukung inisiatif bersama di KMP Sigi Hijau.
- Kerjasama PUPL aceh tamiang, FKL, IDH dan LTKL dalam hal mendorong kolaborasi untuk memperkuat kapasitas kemitraan multi pihak PUPL. Tujuan dari kolaborasi ini adalah untuk menyiapkan peta jalan pengembangan kelembagaan, memperkuat peran sebagai lembaga multi-pihak dalam monitoring, pelaporan, dan verifikasi, memperkuat manajemen data melalui kolaborasi multi-pihak

- Sekretariat Bersama Sintang mendukung penerbitan regulasi Sintang Collaborative Governance (SGC) pada Juni 2024 yang bertujuan untuk mengatur pelaksanaan kolaborasi Pemerintah Kabupaten Sintang dan mitra pembangunan dalam rangka mendukung pencapaian IKU Daerah Kabupaten Sintang sebagaimana termuat dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Model Aktivasi Kemitraan Nasional dan Daerah Dengan Model *Community of Practice* dan *Exchange Learning Program*

- Model aktivasi kemitraan nasional dan daerah melalui *Exchange Learning Program* Potret DAS dan Upaya Mitigasi Banjir di Kabupaten Anggota LTKL telah dilakukan pada 29 Februari 2024. Program ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, khususnya dalam konteks mitigasi risiko bencana banjir. Tujuan utama dari program ini adalah untuk memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah dan jejaring mitra.
- *Community of Practice #1* telah dilaksanakan dengan fokus topik “Kesiapan Kabupaten Menghadapi Pasar Global” dengan peserta 18 mitra. Hasilnya, telah teridentifikasi beberapa langkah penguatan regulasi dan kebijakan yang dapat didukung untuk mendorong produksi komoditas bebas deforestasi. Publikasi bersama dari kegiatan disampaikan dalam sesi RSPO RT 2023.
- Dalam rangka percepatan realisasi Kemitraan Multi Pihak (KMP) Kabupaten Sigi, Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) dan Pemerintah Kabupaten Sigi mengadakan *bootcamp* yang dihadiri berbagai lembaga di bulan Desember 2023. *Bootcamp* ini memfasilitasi KMP untuk merumuskan tujuan bersama, rencana kerja, dan indikator keberhasilan. Agenda tersebut dirancang agar KMP memiliki peta jalan dalam implementasi Sigi Hijau.



Peningkatan Kapasitas Pilar Inovasi dan Investasi

Pilar ini berperan sebagai *enabler* (pemain pemungkin) dan katalisator untuk mempersiapkan kondisi pemungkin, dan pipeline investasi serta merangkum inovasi lestari yang sudah ada untuk menjadi basis resep yang dapat direplikasi.

Pilar ini mendorong adanya entitas dalam bentuk sentra, yang berfungsi sebagai inkubator produk-produk lokal berkelanjutan (Sentra Inkubasi) dan sentra yang berperan dalam pengembangan inovasi dan produk hilirisasi berbasis alam (Sentra Inovasi dan Produksi) di kabupaten anggota LTKL sebagai bentuk mewujudkan visi ekonomi lestari.

Total +-83 portfolio telah terbentuk di 6 kabupaten yang terbagi ke tier portofolio *venture acceleration*, *venture build* portfolio dan *incubees* dengan beberapa komoditas seperti kopi, coklat, ikan gabus dan lainnya.

Sentra Inkubasi

Nama Sentra

Skelas
(Sentra Kreatif Lestari Siak)



Kabupaten Siak

Deskripsi Sentra

Skelas merupakan pusat inkubasi yang diinisiasi oleh orang muda Kabupaten Siak untuk meningkatkan ekonomi masyarakat lewat solusi kreatif yang berbasis ekonomi lestari serta pelestarian budaya Lokal

Instagram: @skelas.siak

Capaian 2023-2024

Program KUBISA (Inkubasi Bisnis Lestari Siak)

7 UMKM mengikuti program inkubasi

Gampiri Interaksi Lestari



Kabupaten Musi Banyuasin

Gampiri Interaksi Lestari adalah wadah gotong royong orang muda dalam membantu pemerintah daerah mewujudkan ekonomi restoratif melalui pengembangan usaha lestari dan produk hilirisasi berbasis alam untuk melindungi >70% hutan dengan tetap mensejahterakan masyarakat.

Instagram: @gampiriinteraksi.sigi

Program GIAT (Gampiri Inkubasi Usaha Lestari)

45 UMKM mengikuti program inkubasi

Nama Sentra

Gemilang
(Gerak dari Mimpi untuk Melestarikan Sintang)



Kabupaten Sintang

Deskripsi Sentra

Gemilang yang juga disebut Gemilang Sintang Lestari adalah suatu wadah organisasi untuk merangkul semangat jiwa muda demi mewujudkan Sintang Lestari. Gemilang mempunyai tiga fokus program yaitu peningkatan kapasitas SDM, inkubasi UMKM serta penjagaan hutan dan wilayah adat.

Instagram: @gemilang.sintang

Capaian 2023-2024

Program GEMARI (Gemilang Inkubasi Usaha Lestari)

16 UMKM

lolos kurasi lalu

4 UMKM

di antaranya mendapatkan penghargaan dengan kategori Berdampak, Terinovasi, Terbaik dan Terfavorit

Selaras

(Sentra Ekonomi Lestari Serasen Sekate)



Kabupaten Musi Banyuasin

Selaras didirikan dengan visi untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif, inovatif, dan ramah lingkungan. Selaras mendorong kolaborasi antara generasi muda, perusahaan, pemerintah, dan lembaga non-profit.

Instagram: @selaras.muba

Program SINAR (Selaras Inkubasi Usaha Lestari)

13 UMKM

telah mengikuti program inkubasi

Samudra Bekudong'k

(Satria Muda Daranante)



Kabupaten Sanggau

Samudra Bekudong'k adalah gerakan yang bertujuan untuk menjadikan Sanggau sebagai rumah yang kaya akan potensi alam yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan. Fokus kami adalah meningkatkan kesadaran generasi muda tentang isu-isu penting seperti lingkungan, kreativitas sektoral, ekowisata, dan pengembangan usaha yang berkelanjutan.

Instagram: @samudra_bekudongk

Program SADARI (Samudra Inkubasi Bisnis Lestari)

14 UMKM

peserta mengikuti program inkubasi

Sentra Produksi dan Inovasi



PT Alam Siak Lestari



Alam Siak Lestari

Kabupaten Siak

Deskripsi Sentra

Alam Siak Lestari (ASL) merupakan perusahaan masyarakat yang bergerak di bidang riset dan produksi bahan alam dari Siak, digerakkan oleh masyarakat lokal. Mengusung semangat Ekonomi Lestari dengan memberikan kesempatan untuk anak muda berkarya dengan mengembangkan potensi lokal.

Capaian 2023-2024

ASL telah melakukan 18 riset produk dari ikan gabus, kacang mete dan nanas. Dari ikan gabus, telah mengolah 1,25 ton ikan gabus untuk memproduksi 85,41 kg bubuk albumin dan menjadi 1.838 botol Albugo.

Instagram: @alamsiaklestari @labsiak.id



SSL (Semesta Sintang Lestari)

Kabupaten Sintang

Deskripsi Sentra

Semesta Sintang Lestari (SSL) adalah sentra inovasi dan produksi dari Kabupaten Sintang yang berfokus pada riset dan pengembangan potensi sumber daya alam lokal. Dengan fasilitas seperti Lab. Bestari, SSL melakukan penelitian mendalam di beberapa komoditas di Sintang untuk mengidentifikasi potensi ekonomi dan ekologi dari komoditas tersebut.

Capaian 2023-2024

Pada lab. Bestari telah terdapat 7 produk turunan melalui riset inovasi basis alam dari asam maram, ikan toman dan tengkawang.

Instagram: @semestasintanglestari @labestari.id





Kalara

Kabupaten Sintang, Sanggau dan Kapuas Hulu

Deskripsi Sentra

Kalara atau Kalara Borneo adalah produsen coklat artisan dari Kalimantan Barat. Dengan sistem agroforestri, coklat dibudidayakan di antara perkebunan karet di Kabupaten Sintang dan berbagai tanaman hutan serta komoditas lainnya di Kabupaten Kapuas Hulu untuk memanfaatkan lahan yang ada tanpa membuka lahan baru. Selain coklat, Kalara juga memproduksi asam maram

Capaian 2023-2024

Kalara membuka potensi ekspansi untuk kerjasama dengan koperasi di Kabupaten Kapuas Hulu dan juga Kabupaten Sanggau. Saat ini Kalara memproduksi coklat dan asam maram.

Instagram: @kalaraborneo



Pinaloka

Kabupaten Slak

Deskripsi Sentra

Pinaloka adalah sentra produksi yang mengolah produk yang berasal dari nanas yang ditanam di lahan gambut yang terjaga. Pinaloka bekerja sama dengan petani lokal yang ahli dalam budidaya nanas di lahan gambut menggunakan metode pertanian yang berkelanjutan.

Capaian 2023-2024

Pinaloka merupakan UMKM didikan dari inkubator SKELAS di Kabupaten Siak. Produk dari Pinaloka adalah jus nanas dan makanan ringan.

Instagram: @pinaloka.id



Gampiri Bumi Lestari

Kabupaten Sigi

Deskripsi Sentra

Gampiri Bumi Lestari berdedikasi untuk mendukung para petani dengan membuka akses pasar yang lebih luas dan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi para petani. Dalam misinya, Gampiri juga berkomitmen menjaga keanekaragaman hayati dan kesehatan ekosistem.

Capaian 2023-2024

Gampiri fokus untuk membuka akses pasar untuk komoditas unggulan Kabupaten Sigi seperti kopi, vanili dan Kakao. Telah mendapatkan potensi produksi kopi dan vanili dengan total +- 8,5 ton



Kinerja Peningkatan Kapasitas Pilar Inovasi dan Investasi

Pelatihan Penyusunan Strategi, Tata Kelola dan Operasional Sentra Inovasi, Sentra Produksi, dan Sentra Inkubasi

Telah dilaksanakan pengembangan kapasitas untuk sentra inovasi, sentra produksi, dan sentra inkubasi yang berfokus di tata kelola dan operasional. Pada bulan Februari 2024, sentra di Kabupaten Siak, Musi Banyuasin, Sintang, Sanggau, dan Sigi mengikuti kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas seluruh sentra dalam strategi, tata kelola, operasionalisasi kelembagaan, alignment OKR, serta memperkuat peran organisasi dan perseorangan dari perwakilan sentra. Melalui kegiatan ini dihasilkan 13 Dokumen Strategis Sentra dan OKR Sentra yang disepakati untuk mendukung pencapaian target.

Kegiatan peningkatan kapasitas lain juga telah dilaksanakan dengan bantuan Lingkaran dan Talenfit untuk aspek pemetaan kebutuhan kemampuan pemimpin di sentra serta aspek pemasaran, analisis bisnis, pengembangan produk dan strategi pertumbuhannya. Selain itu, pembinaan untuk merancang model bisnis dan tata kelola perusahaan untuk ASL dan Kalara juga sedang dilakukan sebagai persiapan penerimaan pendanaan untuk pengembangan produk.



Peningkatan Kapasitas Pilar Pemantauan, Pelaporan dan Komunikasi

Pilar ini adalah membantu memfasilitasi kabupaten dan mitra untuk menyepakati bentuk pelaporan yang efektif, menginformasikan kemajuan kabupaten, serta penggunaan kanal komunikasi yang paling efektif dalam diseminasi informasi kemajuan tersebut.

Kinerja Peningkatan Kapasitas Pilar Pemantauan, Pelaporan dan Komunikasi

Mengukur Kinerja Pelaporan Iklim dengan Uji Coba Kuisisioner Kinerja Pemerintah Daerah CDP 2023 di Kabupaten Sintang dan Sigi

Di Kabupaten Sintang dan Sigi, telah dilakukan Uji Coba Kuisisioner Kinerja Pemerintah Daerah CDP 2023, dan umpan balik terkait skor yang dimulai pada Agustus 2023 - Februari 2024. Hal ini untuk mengukur kinerja pelaporan iklim, sebagai upaya meningkatkan daya saing daerah berdasarkan indikator adaptasi dan mitigasi iklim serta kehutanan secara global. Untuk itu perlu mendorong konektivitas indikator Kuisisioner Kinerja Pemerintah Daerah CDP 2023 pada dokumen perencanaan maupun kebijakan daerah, agar dapat meningkatkan skor penilaian yang lebih baik. Tantangan dalam salah satu sistem pelaporan global ini, pemerintah daerah masih belum memahami manfaat dari konektivitas indikator ini, karena belum adanya keuntungan yang jelas apabila melaporkan ke dalam platform tersebut.

Asesmen dan Penyusunan SOP Tata Kelola Data Multipihak di Kapas Hulu Bekerja Sama dengan Jabar Digital Service

Di Kabupaten Kapuas Hulu, telah dilakukan asesmen dan penyusunan SOP Tata Kelola Data Multipihak bekerjasama dengan Jabar Digital Service (JDS). Proses asesmen tersebut melibatkan pemerintah kabupaten yang diwakili oleh Diskominfo bidang Statistik, BPS, dan Bappeda. Selain itu, mitra pembangunan daerah yang dilibatkan yakni; GIZ, Bentang Kalimantan Tangguh, dan Riak Bumi. Terdapat dua dokumen dari hasil asesmen tersebut, yakni Analisis dan Rekomendasi Manajemen Data Multipihak serta SOP Manajemen Data Multipihak Kapuas Hulu. Saat ini, dokumen tersebut belum didiseminasikan hasilnya pada para pemangku kepentingan di Kabupaten Kapuas Hulu.

Piloting pelaporan bersama Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan di dua kabupaten, Aceh Tamiang dan Sanggau

Piloting pelaporan bersama Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan berlangsung di kabupaten, Aceh Tamiang dan Sanggau, dua dari lima kabupaten yang telah berkomitmen untuk mengimplementasikan kerangka tersebut Aceh Tamiang saat ini sedang dalam proses pengumpulan data melalui sinkronisasi dengan Kerangka Daya Saing Daerah, setelah membentuk tim multipihak melalui sistem Satu Data Indonesia yang melibatkan peran aktif BPS, Diskominfo, dan Bappeda. Sedangkan, Sanggau akan memulai proses pengumpulan data melalui forum multipihak, Sabang Merah Berdompu.



Insentif Publik dan Non-Publik



- Insentif Publik
- Insentif Non Publik

4



INSENTIF PUBLIK

Insentif Publik merupakan insentif yang diberikan oleh pemerintah nasional maupun badan pendanaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan prinsip berkelanjutan.

UMKM di Kabupaten Sigi Ikuti Program Inkubasi Gampiri Interaksi Lestari berkolaborasi dengan Dinas Koperasi Kabupaten Sigi

Melalui program DAK Non-Fisik PK2UMK Kementerian Koperasi dengan total anggaran senilai Rp 424.499.950, Dinas Koperasi Kabupaten Sigi, berkolaborasi dengan Gampiri Interaksi Lestari mengadakan program inkubasi berbasis Panduan Investasi Lestari yang menargetkan 25 UMKM di Kabupaten Sigi. Program ini terdiri dari pra-inkubasi, inkubasi, dan pasca-inkubasi yang dimulai pada bulan April-Oktober 2024. Sebelumnya, Gampiri Interaksi Lestari juga telah melaksanakan program inkubasi bertajuk GIAT (Gampiri Inkubasi Usaha Lestari) sebagai upaya pengembangan kapasitas 19 UMKM lokal dan menghasilkan 13 produk berbasis alam, dalam rangkaian Festival Lestari pada tahun 2023 lalu.



Inisiatif Percepatan Sistem Penelusuran Komoditas Lestari Melalui Sistem Nasional Dasbor

LTKL telah menjadi bagian dari Komite Teknis Dasbor Nasional Data dan Informasi Komoditi Berkelanjutan Indonesia sebagai anggota Bidang Pengembangan Sistem Ketelusuran Rantai Pasok Komoditi Perkebunan Berkelanjutan. Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan SDA Kemenko Perekonomian. Keterlibatan ini diharapkan dapat membuka insentif untuk pendanaan dan dukungan untuk dapat menunjukkan ketertelusuran perjalanan produk dari petani hingga ke pembeli, salah satunya dengan peralihan ke e-STDB. Saat ini sedang berlangsung proses *piloting* di empat Kabupaten anggota untuk beberapa komoditas unggulan, yakni Aceh Tamiang (sawit), Musi Banyuasin (sawit), Siak (sawit), dan Sigi (kakao dan kopi).



Dukung Inkubasi, LTKL Dorong Upaya Akses DAK Non-Fisik di Kabupaten Sigi dan Gorontalo

Dalam membuka insentif publik melalui DAK non-fisik di dua Kabupaten, Sekretariat LTKL bersama Gampiri Interaksi telah mengakses dana untuk kegiatan inkubasi di Kabupaten Sigi. Selain itu, DAK non-fisik juga sedang diupayakan untuk diakses bersama calon mitra di Kabupaten Gorontalo untuk tiga program utama: 1) Pelatihan Manajemen Mutu & Pengelolaan Sentra IKM, 2) Pelatihan Pengelolaan Bisnis & Manajemen Wirausaha, difokuskan pada pelaku IKM di Industri Kelapa, dan 3) Pendampingan Produksi & Akses Bahan Baku untuk Memenuhi Standar Kemitraan.



Semesta Sintang Lestari, Kembangkan Bischo, Biskuit Cegah Stunting Untuk Turunkan Angka Stunting di Kabupaten Sintang

Sentra Inovasi dan Produksi, PT Semesta Sintang Lestari didukung anggaran dari Pemerintah Kabupaten sebesar Rp140.000.000 untuk pengembangan riset dan produksi Bischo, biskuit kaya nutrisi yang berasal dari tepung ikan gabus yang dicampur dengan sumber bahan pangan lokal lainnya yang memiliki manfaat untuk mencegah stunting pada balita. Biskuit ini kemudian menjadi bagian dari program penurunan angka stunting di Kabupaten Sintang. Tak hanya itu, dalam proses produksinya PT Semesta Lestari melibatkan ibu-ibu pelaku UMKM dan juga guru-guru dari SMK Kartini.



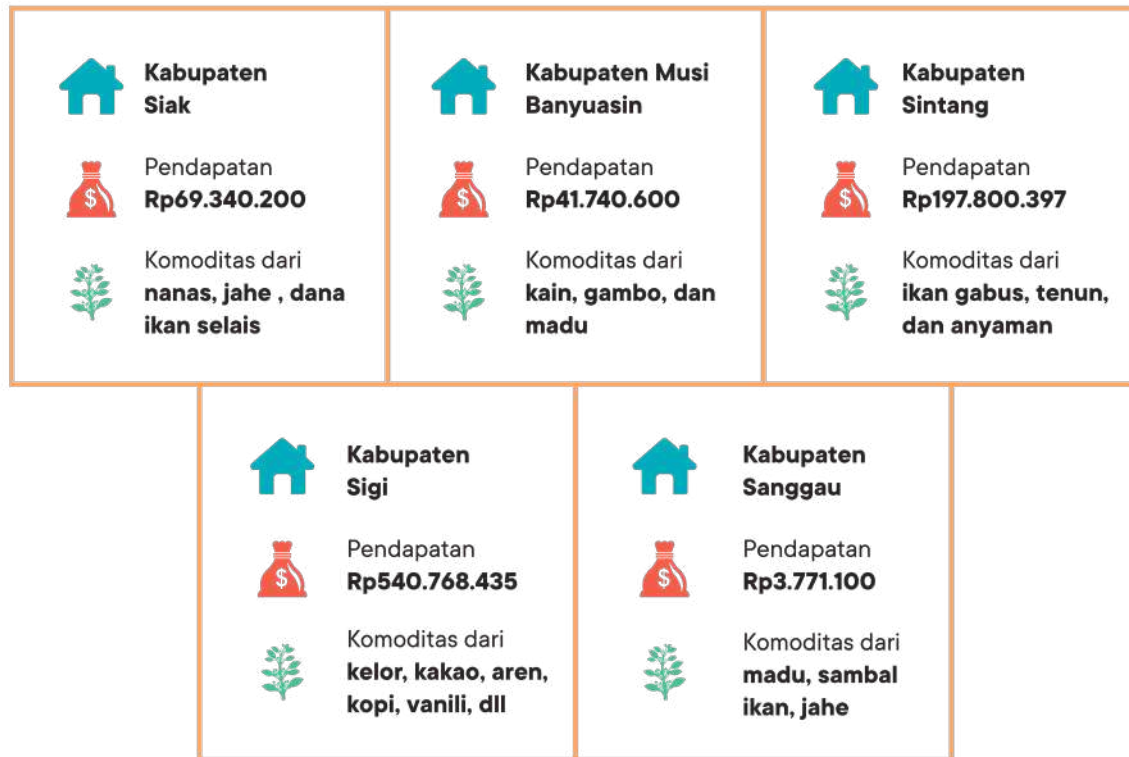
INSENTIF NON-PUBLIK

Insentif Non-Publik merupakan bentuk insentif yang berasal dari investor/*private sector*/mitra pembangunan lainnya dalam bentuk transaksi, komitmen pendanaan, penghargaan/pengakuan, peningkatan kapasitas untuk kabupaten berbasis kinerja.

Penghargaan yang diperoleh 9 Kabupaten Anggota LTKL selama 2023-2024

24 penghargaan provinsi, 37 penghargaan nasional, 1 penghargaan global di beberapa sektor di antaranya kesejahteraan sosial, lingkungan hidup dan tata kelola pemerintahan

Total Pendapatan Komoditas Kabupaten Dari Sentra



Data: Juni 2023- Juli 2024

Treasure of Sigi: Program Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Sigi bersama LTKL, Gampiri Interaksi Lestari, The Dharmawangsa, dan Javara

Pemerintah Kabupaten Sigi bersama LTKL, Gampiri Interaksi Lestari, The Dharmawangsa, dan Javara mengadakan "Treasure of Sigi" yang berlangsung di The Dharmawangsa Hotel dari tanggal 3 hingga 31 Mei 2024, yang dilanjutkan dengan membawa "Treasure of Sigi" sebagai bagian dari Ubud Food Festival 2024 di Bali pada tanggal 31 Mei - 1 Juni 2024.



of Sigi" adalah peluncuran Paket Ekowisata Sigi yang telah dipersiapkan oleh Gampiri Interaksi Lestari.

Kerjasama ini berhasil menampilkan dan mempromosikan inovasi kuliner khas Sulawesi Tengah, mengenalkan budaya Sulawesi Tengah, produk UMKM, serta potensi wisata dari Kabupaten Sigi. Bagian besar dari rangkaian "Treasure

Hasil langsung dari event kolaboratif ini berupa penjualan produk UMKM yang ditampilkan pada pameran produk senilai Rp1.180.000 dan menu *Treasure of Sigi* senilai Rp 8.508.335. Selain itu, terdapat potensi kolaborasi antara pemerintah kabupaten Sigi dengan The Dharmawangsa untuk mengadakan *Training of Trainer (ToT) Hospitality* bagi pengelola penginapan di Lindu dengan nilai valuasi Rp 350.000.000 untuk pelatihan selama 30 hari.



Membuka Akses Pasar Inovasi Basis Alam dari Komoditas Kopi dan Vanili dari Kabupaten Sigi

Komoditas Kopi dan Vanili dari Kabupaten Sigi telah mendapatkan transaksi pembelian yang berpotensi berkembang menjadi ekspansi produksi komoditas tersebut. Transaksi pembelian sejumlah kopi Sigi dilakukan oleh Java Kirana dengan besaran nilai transaksi sekitar Rp60.000.000 sejak pasca Festival Lestari, Juni hingga Desember 2023. Potensi *offtake* kopi ini mencapai sekitar 5 ton per bulan sehingga saat ini sedang berlangsung tahap pemetaan petani kopi sebagai pemasok dari Kecamatan Palolo yang dilakukan oleh Gampiri Bumi Lestari.

Sedangkan untuk vanili, Conservana telah melakukan pembelian kurang lebih 3,5 ton vanili hijau dari Koperasi Simpotove Kabupaten Sigi sepanjang tahun 2023 dengan nilai transaksi kurang lebih +/- Rp 450.000.000. Selanjutnya, Conservana sedang melakukan pemetaan potensi pengembangan dan pemanfaatan lahan TORA di Desa Bunga yang salah satu programnya adalah pembuatan *mini mills* untuk pengolahan pasca panen komoditas vanili dan kopi bersama Java Kirana.

Restorasi dan Riset Pengembangan Produk Ramah Gambut Dari Nanas

SKELAS, Alam Siak Lestari (ASL), Pinaloka dan PT HHM menerima pendanaan untuk program restorasi dan riset pengembangan produk turunan berbasis alam yang ramah gambut bekerja sama dengan petani lokal. Riset yang sedang berlangsung adalah produk bernilai

tambah dari komoditi nanas, dengan bentuk demplot dengan komoditas lainnya seperti kopi sebagai tanaman sela. Untuk berbagi pengetahuan mengenai cerita baik dari kegiatan ini akan dilakukan pemberitaan digital dan acara salah satunya adalah *Skelas Innovation Challenge*.

Anomali Coffee dan Pinaloka, Promosikan Komoditas Unggulan Kabupaten Siak

Nanas Mahkota Siak sebagai komoditas unggulan Kabupaten Siak, yang juga memiliki manfaat ekologi untuk mengurangi risiko kebakaran lahan gambut, diperkenalkan kepada masyarakat lebih luas, melalui kolaborasi LTLK dengan Pinaloka dan Anomali Coffee. Disajikan sebagai salah satu bahan untuk menu baru di Anomali Coffee, produk dari Pinaloka yang merupakan UMKM didikan dari inkubator SKELAS di Kabupaten Siak ini, berhasil mendapatkan penjualan senilai Rp13.970.000 selama 3 bulan.



Produk Kriya Lokal Lestari di INACRAFT 2023

Untuk mempromosikan produk lokal lestari dari kabupaten anggota, Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) berpartisipasi dalam INACRAFT 2023 yang dilangsungkan di Jakarta pada tanggal 04 Oktober 2023 - 15 November 2023 lalu. Pada ajang pameran kerajinan dan kriya tahunan terbesar ini, Gerai Kabupaten Lestari menampilkan berbagai produk Kriya dan Fashion dari berbagai kabupaten anggota, yang didukung oleh program aktivasi melalui booth, talkshow, kelas kreatif, dan kampanye media sosial. Tujuan utama dari partisipasi ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama orang muda,



akan pentingnya produk lokal berkelanjutan serta membuka peluang kolaborasi strategis. Pada event ini produk lokal lestari berhasil mencatatkan penjualan sebesar Rp12.187.000.

World Coconut Day : Pengembangan Portofolio Kelapa Berkelanjutan Kabupaten Gorontalo

Kelapa merupakan komoditas penting untuk Kabupaten Gorontalo. Untuk mengoptimalkan potensi ini, Kabupaten Gorontalo menyelenggarakan *Business and Partnership Matching* dalam rangka *World Coconut Day* pada 22 September 2023 lalu. Pada acara yang diselenggarakan di Kabupaten Gorontalo ini, lima Portofolio dipresentasikan oleh Bambang Supriyanto, Kabag. Ekonomi, Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, dalam Portofolio Industri Hijau Kelapa Terintegrasi Gorontalo. Dari kegiatan ini menghasilkan dua perjanjian kerjasama untuk mendukung kelapa berkelanjutan serta potensi kerjasama lain-



nya. Total valuasi potensi dari acara ini sebesar Rp11,8 miliar dalam mendorong kelapa berkelanjutan.

Kabupaten Sintang Gelar Mitra Pembangunan Awards I dan CSR Awards V 2023

Sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dalam membangun dan mewujudkan Sintang Lestari secara kolaborasi, pemerintah Kabupaten Sintang menggelar CSR dan Mitra Pembangunan Awards Tahun 2023. Tahun 2023 total nilai pembangunan melalui program CSR Rp32.771.185.272.

Mitra Pembangunan Award baru pertama kali digelar pada tahun 2023 dengan total 41 lembaga mitra pembangunan. Sebanyak 133 dari 391 desa

yang tersebar di 13 kecamatan menjadi wilayah pendampingan. Mitra pembangunan telah berkontribusi dalam target pembangunan yang tertuang dalam 12 program utama RPJMD yakni : Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Budaya, Ekonomi, Lingkungan, Stunting, Sanitasi dan Air bersih, Kabupaten Layak Anak, Tata Kelola Pemerintahan, Penanggulangan Narkoba dan Kebencanaan. Total nilai kontribusi mitra tahun 2023 adalah Rp21.030.911.225.

Aksi Kolektif



5

Lingkar Temu Kabupaten Lestari menegaskan pentingnya aksi kolektif secara multipihak untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan khususnya di sembilan kabupaten anggota LTKL. Untuk mencapai hal tersebut, LTKL melalui fungsinya berupaya mengembangkan jejaring kemitraan di kabupaten LTKL melalui aksi kolaboratif untuk mencapai tujuan bersama.

Ecoleap: Kolaborasi Membuka Peluang Kerja Hijau



Kolaborasi Tanah Air Lestari (TAL) dan Generasi Lestari yang didukung oleh *Allianz Social Impact Fund* (SIF) mengadakan serangkaian kegiatan bertajuk Ecoleap yang bertujuan untuk menghubungkan tenaga kerja dengan penyedia kerja. Program ini diselenggarakan di Sulawesi Tengah, yang masuk ke dalam Cagar Biosfer Lore Lindu dan melibatkan penyedia kerja serta 26 orang muda terpilih untuk menjalani *bootcamp*. Pada akhir program, akan diselenggarakan pameran pekerjaan dan peluang, untuk mengeksplorasi peluang kolaborasi maupun prospek pekerjaan yang sesuai.

Amplifikasi Model Pengadaan Barang dan Jasa Berkelanjutan



APKASI Procurement Network (APN) merupakan kegiatan tahunan APKASI dengan tujuan untuk mendorong proses pengadaan barang dan jasa berkelanjutan. LTKL juga menyusun Peta Jalan Pengadaan Barang dan Jasa Berkelanjutan secara kolaboratif yang saat ini sedang ditinjau oleh Direktur Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah dan Koperasi Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri untuk dapat didistribusikan pada pemerintah daerah. Peta jalan ini yang telah diluncurkan dalam bentuk rekomendasi regulasi ini perlu diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan. Aksi konkret yang sudah berjalan seperti inisiatif yang dilakukan oleh Alam Siak Lestari (ASL) yang berhasil masuk ke dalam e-katalog pengadaan barang dan jasa untuk produk albumin.

Peningkatan Peran UMKM Melalui Bimtek dan Akses Pendanaan di Kabupaten Musi Banyuasin dan Siak



Dirjen Bina Bangda Kemendagri melakukan pemantauan dan evaluasi terkait Program Bangga Buatan Indonesia ke Kabupaten Musi Banyuasin, untuk menerima masukan terkait implementasi Pengadaan Barang dan Jasa melalui e-katalog LKPP. Salah satunya, upaya yang didorong melalui Selaras bersama pemerintah kabupaten Musi Banyuasin dan PUKL dengan memberikan bimbingan teknis agar UMKM yang sesuai dengan kriteria dapat masuk dalam e-katalog.

Sementara itu, Bappenas melakukan pendampingan mengenai akses pendanaan UMKM di Kabupaten Musi Banyuasin dan Siak, yang diikuti enam UMKM. Catatan penting dari kegiatan tersebut antara lain, perlu adanya model pendanaan yang lebih fleksibel melalui surat rekomendasi pemkab, dan pendampingan secara berkala melalui peningkatan kapasitas, serta terhubung pada akses pasar yang lebih luas.

Ko-Kreasi Penyusunan Peta Jalan Lanskap (*Landscape Blueprint*)



Proforest dengan dukungan dari *Forest Positive Coalition* bekerjasama dengan LTKL untuk mendorong inisiatif *Landscape Blueprint* (Peta Jalan Lanskap) yang merupakan bentuk peta jalan inisiatif di tingkat lanskap yang memperlihatkan model kolektif dalam mendorong rantai pasok berkelanjutan. Proses ini dilakukan dengan beberapa tahap yang dimulai dengan merekam proses yang sudah berjalan di tingkat lanskap atau yurisdiksi dalam menjalankan pendekatan yurisdiksi. Tujuan dari peta jalan ini agar dapat mengembangkan strategi jangka panjang dalam mencapai tujuan bersama, yang didukung oleh pemerintah daerah dan sektor swasta. Model ini diujicobakan di Aceh Tamiang, Siak, dan Sintang melalui kelembagaan multipihak.

Kolaborasi Kolektif dalam Mendorong Model Inovasi Pendanaan Berbasis Yurisdiksi

Tropical Forest Alliance (TFA), Filantropi Indonesia (FI), Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia (DIPI), dan LTKL bersama-sama mengembangkan kemitraan di tingkat yurisdiksi untuk membuka peluang pembiayaan dalam mendukung pengurangan deforestasi dan komoditas berkelanjutan. Hal ini berkaitan dengan peningkatan kapasitas kesiapan kabupaten dalam mendorong model tata kelola kabupaten lestari dan terhubung dalam rantai pasok berkelanjutan.

Kolaborasi Membuka Peluang Investasi untuk Komoditas Berkelanjutan

Terratai merupakan organisasi yang berkomitmen untuk memberikan bantuan akses pembiayaan pada perusahaan-perusahaan khususnya di tahap awal yang dapat menunjukkan dampak positif pada alam dan keanekaragaman hayati untuk mengembangkan rantai pasok pada pasar yang lebih luas. Kolaborasi Terratai bersama dengan LTKL dilakukan dengan beberapa perusahaan yang terkoneksi dengan komoditas kelapa dan tengkawang yang berada di Kabupaten Sintang dan Sanggau.

Selain itu, bersama dengan Nusa Transformation Venture (NTV) yang merupakan perusahaan ventura berfokus pada dampak sosial model bisnis berkelanjutan. NTV bersama dengan perusahaan lokal yang terkoneksi dengan rantai pasok kabupaten anggota LTKL, seperti komoditas tengkawang, ikan gabus dan model tumpang sari dalam pengembangan kelapa sawit berkelanjutan. Salah satu dukungan yang diberikan adalah untuk memperkuat kapasitas operasional dan manajerial yang dapat meningkatkan valuasi perusahaan



Inisiatif 100 Regenerative Village (100RV), Kolaborasi Kabupaten Anggota LTKL bersama Jejaring Koalisi Ekonomi Membumi (KEM)

LTKL bersama mitra-mitra Koalisi Ekonomi Membumi (KEM) berkolaborasi mengembangkan rantai pasok komoditas melalui model agroforestri serta menggunakan pendekatan rantai pasok gotong royong (VC3). Inisiatif ini bertujuan untuk menerapkan model portofolio hulu, tengah dan hilir dari sisi ekologi, ekonomi dan sosial pada komoditas agroforestri. Fokus area yang dikolaborasikan di wilayah Sulawesi Tengah (Cagar Biosfer Lore Lindu) dan Kalimantan Barat dengan jejaring mitra yang sudah dibangun termasuk mitra-mitra yang mendukung kondisi pemungkin. Harapannya, hal tersebut dapat mendatangkan investasi dari komoditas basis alam dan dampak jangka panjang pada ekonomi, sosial dan ekologi.

Kertas Posisi Kolektif: Model Kolaborasi Yurisdiksi dan Swasta dalam Pendekatan Lanskap

LTKL tergabung dalam kelompok kerja ISEAL, organisasi global yang berfokus pada aksi kolektif dan inklusif dalam mendorong sistem keberlanjutan dengan berbagai pemangku kepentingan. Selama tahun 2023, LTKL terlibat secara aktif dalam diskusi intensif untuk mendiskusikan kertas posisi yang digunakan secara kolektif dalam mengidentifikasi *baseline* dan ekspektasi dari praktik-praktik yang telah berjalan dalam mendorong investasi yang efektif dan model aksi kolektif di lanskap dan yurisdiksi. Hasil ini juga berisi tentang model klaim yang dapat digunakan di tingkat kabupaten anggota LTKL yang memerlukan model integrasi dari pengukuran progres dan sistem monitoring data antara pihak swasta dan pemangku kepentingan terkait di tingkat yurisdiksi/lanskap.

Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui QR



RSPO RT 2023: Pembelajaran Aksi Kolektif 5 Tahun Inovasi Basis Alam



LTKL menyelenggarakan forum Pembelajaran Aksi Kolektif 5 Tahun Inovasi Berbasis Alam sebagai salah satu side event pertemuan tahunan RSPO RT 2023. Sesi ini bertujuan untuk mempublikasi 'kisah sukses' kabupaten dalam menghadapi pasar global melalui portofolio bisnis berkelanjutan dengan membangun industri menengah berbasis masyarakat dalam menyediakan produk bernilai tambah basis alam. Forum ini terselenggara secara kolaboratif bersama dengan Madani Berkelanjutan, *Tropical Forest Alliance*, dan CDP untuk menunjukkan kolaborasi global, nasional, dan lokal dalam memperlihatkan proses pembelajaran yang sedang berlangsung.

Proses ini diawali dengan adanya kegiatan *Community of Practice #1* dengan fokus topik "Kesiapan Kabupaten Menghadapi Pasar Global" dengan peserta 18 mitra. Hasilnya, teridentifikasinya beberapa langkah penguatan regulasi dan kebijakan yang dapat didukung untuk mendorong produksi komoditas bebas deforestasi antara lain:

- Memperkuat ISPO dan SVLK dengan menambahkan cut-off date deforestasi,
- Memperkuat INPRES 5/2019 tentang penghentian pemberian izin baru di hutan alam primer dan gambut,
- Mengidentifikasi dan mengintegrasikan Areal Bernilai Konservasi Tinggi, Areal Bernilai Karbon Tinggi, dan Kawasan Ekosistem Esensial Lainnya ke dalam rencana tata ruang daerah,
- Mempercepat pengakuan masyarakat adat dan mengintegrasikan wilayah adat ke dalam RTRW,
- Melakukan kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup untuk menentukan cap (batas atas) perkebunan sawit. Hasil ini diramu oleh beberapa mitra dan disampaikan dalam sesi RSPO RT 2023 dengan mengeluarkan publikasi bersama.

Akses ke laporan Global Market Readiness



Dasbor Nasional Ketertelusuran Rantai Pasok Komoditas Pertanian

Tahun 2024, LTKL menjadi bagian dari tim Bidang Pengembangan Sistem Ketelusuran Rantai Pasok Komoditi Perkebunan Berkelanjutan yang merupakan bagian dari Komite Dasbor Nasional. Ini adalah inisiatif lintas kementerian/ lembaga yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang melihat alat ketertelusuran (*traceability*) menjadi penting dalam sistem perdagangan nasional dan global yang diujicobakan untuk komoditas kelapa sawit, kayu, kopi, kakao dan karet. Salah satunya adalah memperkuat peran pemerintah kabupaten dalam percepatane-STDB yang dijadikan salah satu dokumen persyaratan untuk dapat terintegrasi dalam dasbor nasional. Dasbor Nasional juga berfungsi sebagai platform pertukaran data dan informasi nasional, terkait dengan rantai pasok komoditas pertanian yang diperdagangkan secara internasional, agar dapat mematuhi regulasi pasar global salah satunya EUDR (*European Deforestation Regulation*).



Peta Gotong Royong Menjadi “Alat” Pengumpul Sebaran Inisiatif di Tingkat Kabupaten

Di tahun 2023, LTKL mengembangkan sebuah sistem untuk menunjukkan kerja-kerja kolektif melalui berbagai inisiatif mitra baik ditingkat daerah, nasional maupun global dengan mengacu pada 5 pilar kunci melalui Peta Gotong Royong. Dengan adanya Peta Gotong Royong diharapkan mampu membuka peluang kolaborasi dan kerjasama antara para pemangku kepentingan dan mengidentifikasi gap/kesenjangan yang ada. Proses yang telah dilakukan di tahun ini yakni pengumpulan data guna mengumpulkan berbagai informasi yang dapat nantinya akan ditampilkan dalam peta gotong royong. Data Peta Gotong Royong yang telah berhasil dikumpulkan di 7 kabupaten, seperti dasbor yang sudah dibuat oleh Kabupaten Sintang (<https://www.sekbersintang.petaku.online/>) maupun inisiatif dari beberapa forum kolektif masyarakat sipil seperti FORMASI di Kapuas Hulu.

Adopsi Pohon dengan Jejak.in dan Gojek Indonesia

Program Adopsi Pohon telah dilaksanakan di Kabupaten Sigi pada bulan April - Agustus 2023, berkolaborasi dengan Jejak.in dan Gojek untuk mengadopsi pohon di Hutan Ranjuri. Melalui kegiatan ini, telah diadopsi 50 Pohon dengan nilai transaksi Rp8.560.000. Pohon yang diadopsi antara lain adalah pohon Kaili, Bekava, Taipa Dodoro dan Uru Tandu.

Sekretariat LTKL



6

• Strategi Pengembangan Internal Organisasi

Strategi Pengembangan Internal Organisasi



Pendirian dan Pertumbuhan Awal

Sejak didirikan, Sekretariat Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) terus mencari struktur dan tim yang terbaik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Ketika pertama kali didirikan pada tahun 2018, Sekretariat hanya terdiri dari kurang dari lima anggota inti yang dibutuhkan untuk menjalankan inisiatif dan program awal. Namun, seiring berjalannya waktu, Sekretariat tumbuh dan berkembang setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya kebutuhan organisasi yang juga mencerminkan bagaimana Sekretariat LTKL telah mendapatkan keunggulan baik di kalangan anggota maupun pihak eksternal. Kini, sekitar enam tahun kemudian, Sekretariat memiliki 70 staf, di mana 30 di antaranya bekerja dari wilayah kabupaten LTKL, dan lebih dari separuhnya adalah perempuan.

Selain peningkatan jumlah sumber daya manusia, kapasitas pengelolaan keuangan dan aset juga terus ditingkatkan. Setiap tahun, Sekretariat melakukan perbaikan demi menciptakan tata kelola keuangan yang akuntabel dan memastikan sumber daya dikelola secara efektif dan efisien. Hal ini semakin terwujud semenjak tahun 2022 di mana Sekretariat LTKL mulai memiliki sistem keuangan digital yang memastikan staf dapat mengelola dana dengan informasi *real-time* dan menjadi basis komunikasi yang baik antar staf. Tahun ke tahun, LTKL senantiasa mendapatkan hasil audit wajar tanpa pengecualian yang merupakan prestasi yang membanggakan dimana Sekretariat LTKL telah menjaga mandat pengelolaan sumber daya dengan baik.

Pendekatan *Nurturing* Sebagai Strategi Kunci Membangun Tim Dan Melaksanakan Program

Dalam hal merancang dan memilih orang-orang yang bekerja dengan LTKL, Sekretariat berusaha untuk memasukkan semangat untuk menciptakan ruang di mana semua jenis orang merasa nyaman, dihormati, dan didukung. Hal ini penting untuk memastikan semua staf dapat bekerja dengan potensi penuh mereka. Oleh karena itu, Sekretariat LTKL mencoba mengadopsi nilai-nilai inklusivitas gender dan keragaman ke dalam inti tim. Namun, seiring berjalannya waktu disadari bahwa kesetaraan gender bukan hanya tentang jumlah laki-laki dan perempuan yang sama tetapi lebih fokus pada karakter, nilai, dan pendekatan seseorang dalam menjalankan perannya serta posisinya yang penting untuk menjalankan strategi dan menangani situasi.



Dalam hal ini, salah satu nilai & pendekatan utama yang diusung dalam membangun tim, mengembangkan organisasi hingga bekerjasama dengan para pemangku kepentingan adalah pendekatan yang mengutamakan pendekatan *Nurturing* (menjaga dan merawat). *Nurturing* dalam konteks ini diterjemahkan sebagai pendekatan yang sedapat mungkin menunjukkan kepedulian pada kebutuhan pihak yang LTKL rawat & mendorong pertumbuhan atau perkembangan mereka. Gaya pendekatan *nurturing* yang tidak agresif, hangat dan menekankan pada komunikasi terbuka dan setara ini sangat efektif saat berinteraksi dan membangun relasi dengan Pemerintah Kabupaten, Jejaring Mitra hingga staf internal. Para pemangku kepentingan menjadi cenderung lebih terbuka dalam memberikan gagasan dan masukan serta mengungkapkan kebutuhan-kebutuhan yang perlu dipertimbangkan. Pendekatan ini juga tentu, sangat selaras dengan fungsi LTKL sebagai institusi yang harus mampu mengayomi kebutuhan berbagai pihak.

Karenanya, saat membangun tim, Sekretariat LTKL berfokus tidak pada gender semata melainkan pada apakah seseorang memiliki nilai dan pendekatan yang serupa untuk membantu kami mencapai cita-cita. Dalam hal ini tentu saja perlu disampaikan bahwa pendekatan nurturing tidaklah eksklusif terdapat pada wanita saja, melainkan siapapun, tanpa memandang gender, dapat memainkan dan memiliki pendekatan ini.



Pendekatan Inklusif dan Budaya Organisasi

Sekretariat LTKL juga berupaya menciptakan kebijakan yang mengakomodasi kebutuhan spesifik gender seperti cuti melahirkan dan cuti ayah yang fleksibel. Sekretariat LTKL menerapkan jam kerja fleksibel bagi staf untuk menyesuaikan dengan gaya kerja dari rumah (*Work From Home*) guna menyesuaikan kebutuhan domestik dan profesional; dan pembayaran yang setara untuk semua berdasarkan prestasi dan kinerja. Meskipun begitu, Sekretariat LTKL masih terus berupaya untuk memastikan keragaman tidak hanya dalam hal gender, usia, dan budaya, tetapi juga karakter.

Karenanya, untuk menjaga keseimbangan tim yang sehat, Sekretariat LTKL sering menilai karakter staf menggunakan metode sumber daya manusia seperti Lumina dan MBTI. Sekretariat memahami bahwa pendekatan ini tidak selalu diterapkan di tempat lain, itulah sebabnya ketika kami mencoba mendorong para pemangku kepentingan untuk mempertimbangkan keseimbangan keragaman saat melaksanakan program dengan memastikan representasi yang baik dari gender, budaya, dan kelompok etnis.

Tantangan Menciptakan Kekuatan yang Merata bagi Semua

Dalam hal kepemimpinan, Sekretariat LTKL memandang bahwa keterampilan kepemimpinan tidak dimiliki secara eksklusif oleh staf yang berada pada level manajerial. Sekretariat LTKL melihat bahwa semua staf harus memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya berkembang sebagai staf, tetapi juga sebagai individu yang berkembang untuk keperluan dirinya sendiri, lingkungan, dan daerahnya. Kepemimpinan Sekretariat LTKL terjelaskan sebagai kemampuan mengorganisir, menentukan prioritas, mengelola informasi

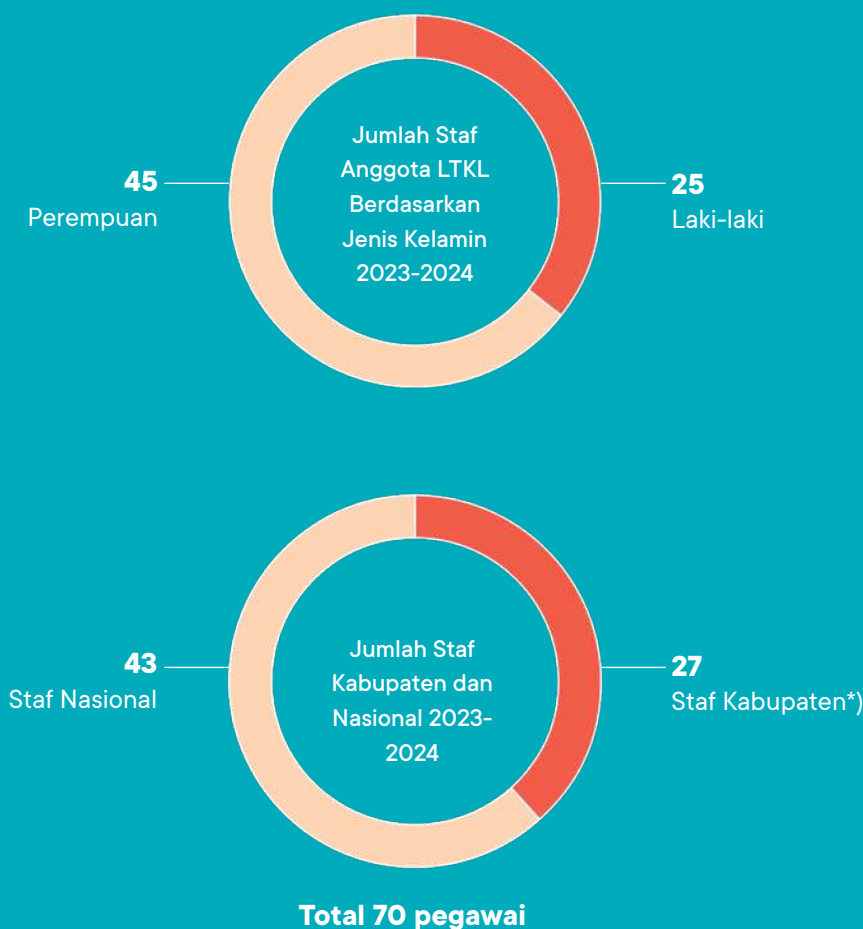
menjadi kekuatan, serta mengelola sumber daya. Hal ini masih menjadi tantangan karena masih terlihat kesenjangan keterampilan antara staf di kabupaten dibandingkan dengan staf yang berasal dari kota besar. Karenanya, Sekretariat LTKL senantiasa melakukan sejumlah program peningkatan kapasitas dan program yang memastikan pemerataan pengetahuan. Di antaranya adalah *bootcamp* sekretariat, kursus kepemimpinan, mentoring antar staf, serta program *buddies* khususnya untuk beberapa keterampilan yang bersifat interpersonal.

Kebijakan Internal Organisasi: Dinamis Dan Akuntabel

Semua pendekatan ini diterjemahkan dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang setiap tahun diperbarui untuk menyesuaikan dengan pembelajaran kami yang dinamis. Dengan demikian, perjalanan membangun struktur kuat Sekretariat LTKL mencerminkan

komitmen terhadap pertumbuhan, keragaman, dan pengembangan yang inklusif, serta adaptasi terhadap kebutuhan yang terus berkembang di lingkungan organisasi yang dinamis.

Jumlah Anggota Sekretariat 2023-2024



*) staf kabupaten tidak semuanya menggunakan "branding" sebagai staf Sekretariat LTKL namun sebagian besar menjadi bagian dari ekosistem kabupaten

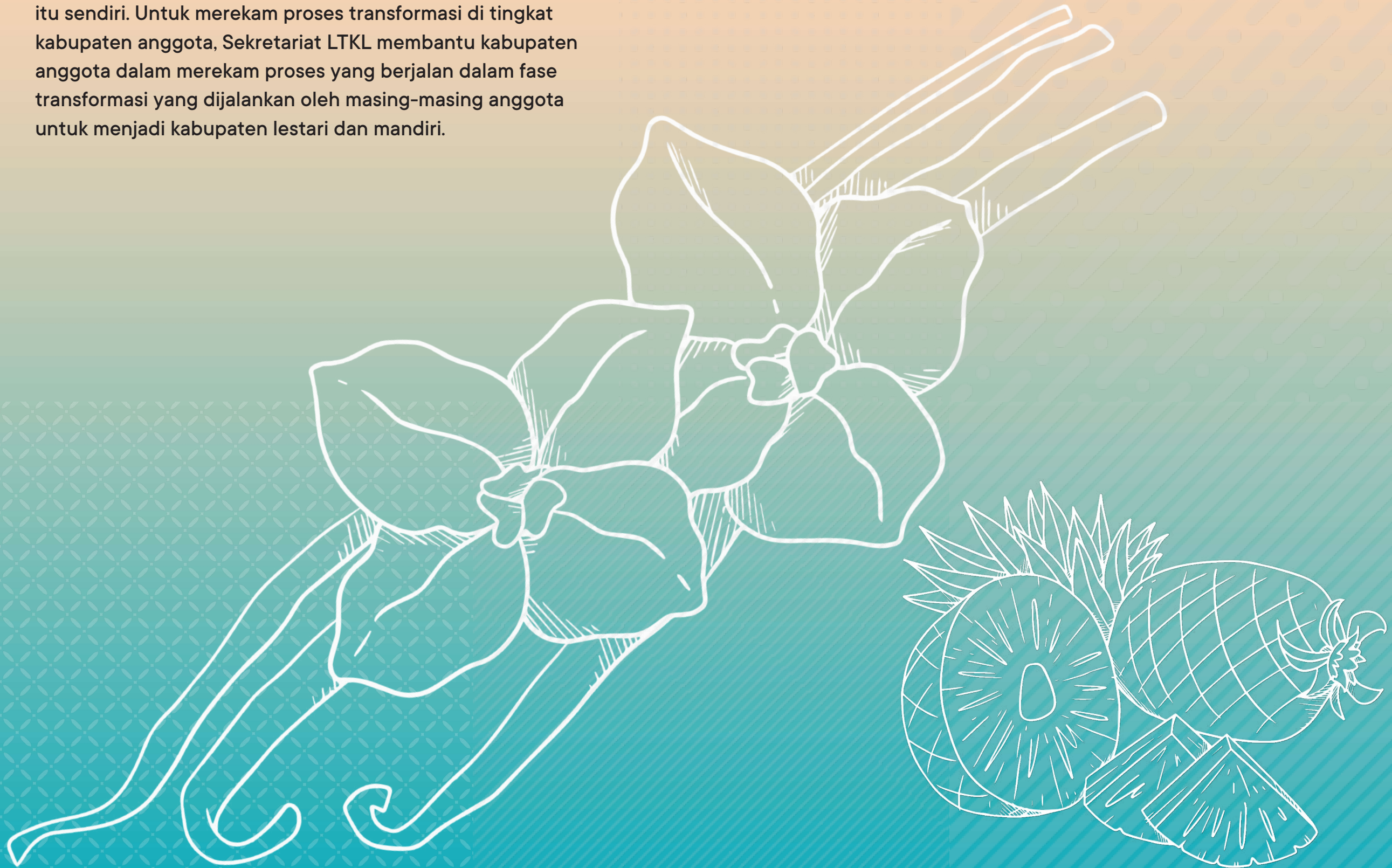
Kemajuan Kabupaten

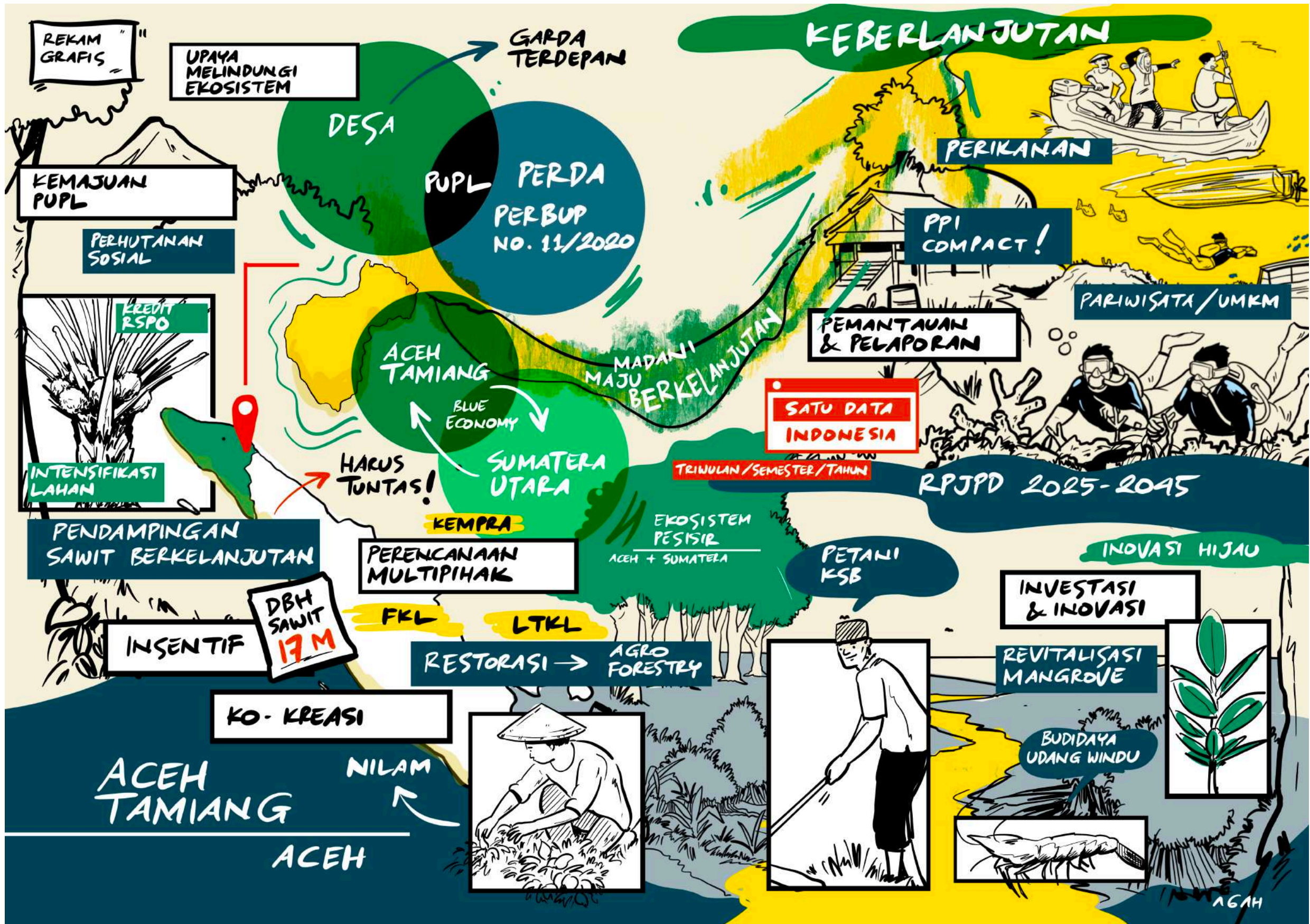
- Kabupaten Aceh Tamiang
- Kabupaten Bone Bolango
- Kabupaten Gorontalo
- Kabupaten Kapuas Hulu
- Kabupaten Musi Banyuasin
- Kabupaten Sanggau
- Kabupaten Siak
- Kabupaten Sigi
- Kabupaten Sintang



7

Proses kemajuan kabupaten anggota LTKL tidak lepas dari proses ko-kreasi secara multipihak di tingkat kabupaten itu sendiri. Untuk merekam proses transformasi di tingkat kabupaten anggota, Sekretariat LTKL membantu kabupaten anggota dalam merekam proses yang berjalan dalam fase transformasi yang dijalankan oleh masing-masing anggota untuk menjadi kabupaten lestari dan mandiri.





Aceh Tamiang Menjemput Kemandirian Ekonomi Melalui Transformasi Komoditas Berkelanjutan

Aceh Tamiang, sebuah kabupaten yang memiliki potensi besar dari sektor perkebunan, terutama perkebunan sawit, yang menyumbang sekitar 40% dari PDRB-nya. Dengan luas lahan sawit sebesar 51.184 hektar, Aceh Tamiang menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan lanskapnya. Salah satu yang dihadapi adalah banjir yang hampir setiap tahun melanda, kekeringan, serta bencana kebakaran hutan dan lahan sebagai dampak negatif dari aktivitas pembukaan lahan untuk perkebunan.

Tahun 2019, Pemerintah Aceh Tamiang bersama KPH Wilayah II Aceh, Yayasan Inisiatif Dagang Hijau (IDH), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI Aceh), Forum Konservasi Leuser (FKL), dan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) membuat kesepakatan untuk Peningkatan Produksi, Proteksi, dan Inklusi untuk pembangunan komoditas yang berkelanjutan di Aceh Tamiang. Inti dari kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan produksi sawit berkelanjutan, mengurangi laju deforestasi dan melindungi fungsi ekosistem penting, serta mengelola lanskap dengan menghadirkan peran multipihak.

Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang tidak bekerja sendiri, kehadiran forum kolaborasi multipihak, Pusat Unggulan Perkebunan Lestari (PUPL) memainkan peran signifikan dalam mencapai target-target pemerintah yang belum tercapai. PUPL memfasilitasi agar lingkungan terjaga lestari dan masyarakat dapat memenuhi

kebutuhan ekonomi melalui peningkatan sumberdaya manusia dan tata kelola komoditas berkelanjutan. PUPL juga berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten untuk mengelola penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit hingga proses reformasi birokrasi dalam mendorong percepatan legalitas seperti Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) sebesar dan sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan seperti ISPO dan RSPO sejumlah 2.200 petani.

PUPL juga mendorong kerjasama pemerintah daerah dan pihak swasta untuk meningkatkan tata kelola dan kolaborasi di Kabupaten Aceh Tamiang. "Dari sisi operasional, PUPL sudah melangkah ke tahap kematangan, dan PUPL dapat menjadi bagian dari pemerintahan secara non-struktural," kata Izzudin dari Badan Pelaksana PUPL

Selain dari sisi komoditas, Aceh Tamiang juga berupaya dalam melindungi beberapa kawasan ekosistem penting dengan mengeluarkan SK Bupati Aceh Tamiang no. 45/193/2023 tentang Pembentukan Tim Pengkajian Kawasan Ekosistem Penting, yang didukung oleh kolaborasi multipihak, termasuk UPTD KPH III, FKL (Forum Konservasi Leuser) dan Yayasan IDH Indonesia dengan membentuk Tim Monitoring Deforestasi.

Di Kabupaten Aceh Tamiang, juga terdapat kawasan yang diajukan dalam konteks perhutanan sosial. "Kami ingin mengajukan Lembaga Pen-

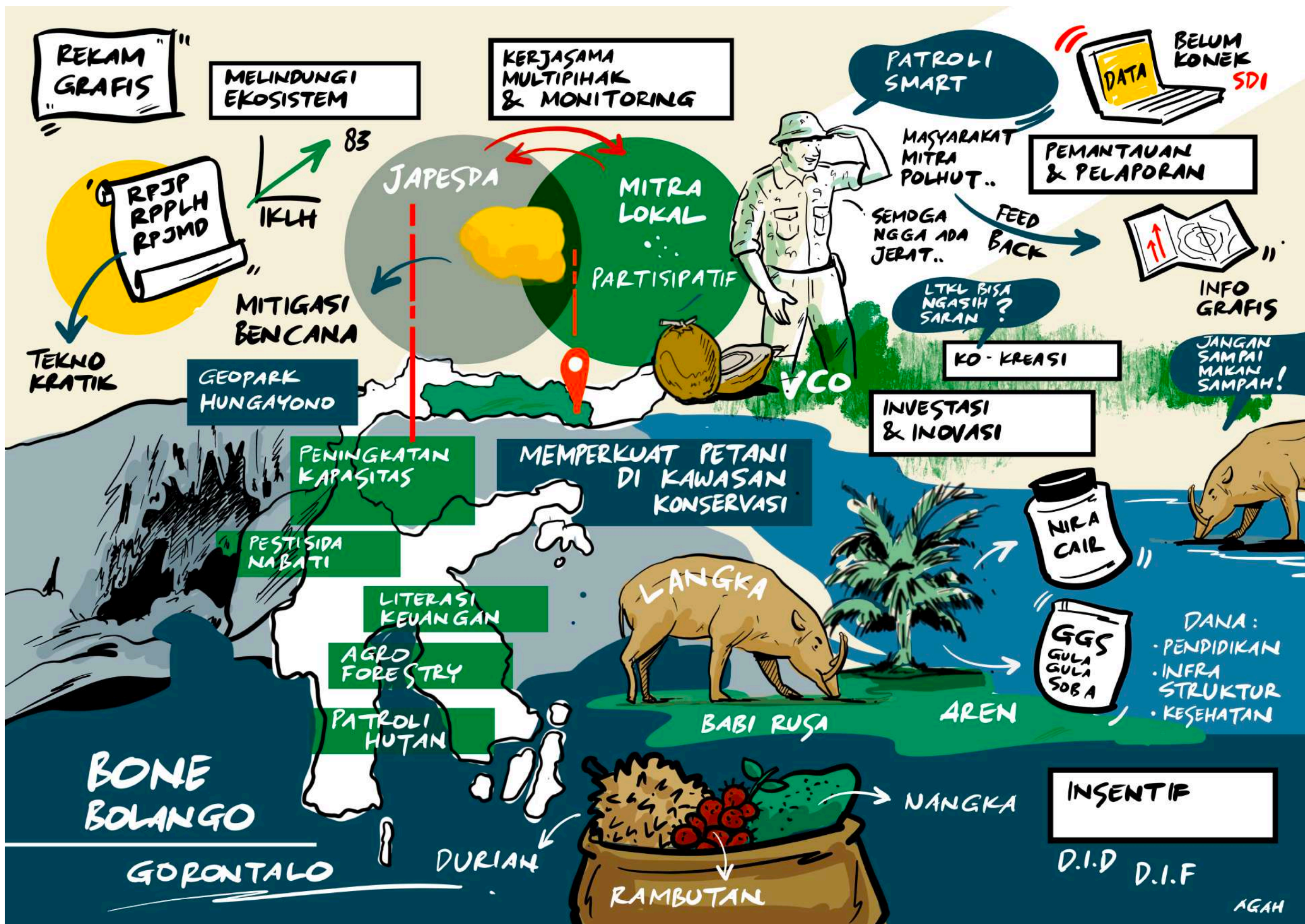
gelola Hutan Desa menjadi garda depan dalam tata kelola sebagai pengelola ekosistem penting desa, dengan skema hutan desa dan hutan kemasyarakatan", ujar Muhammad Yani, Sekretaris Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang.

Salah satu mitra lokal Aceh Tamiang, Forum Konservasi Leuser (FKL) juga bersama dalam melakukan pendampingan masyarakat di dalam kawasan hutan dengan mendorong terbentuknya perhutanan sosial dan mengembangkan model restorasi di kawasan yang terdegradasi yang diakibatkan oleh tumpang tindih lahan khususnya sawit. "Program restorasi kita mencoba meningkatkan pendapatan masyarakat melalui sinergi dengan perlindungan kawasan hutan. Restorasi hutan dengan pola agroforestri dan bekerjasama dengan berbagai pihak di bawah fasilitasi PUPL untuk program pendampingan petani kelapa sawit berkelanjutan, dima-

na masyarakat ditingkatkan secara kapasitas dengan hasil mutu dan produksi dari budidaya tanpa harus memperluas lahan dengan merambah kawasan. Perlindungan kawasan seperti itu yang kita coba giatkan di Aceh Tamiang dengan kolaborasi multipihak. Kesejahteraan masyarakat bisa meningkat tanpa merusak kawasan hutan," kata Yandri dari Forum Konservasi Leuser.

Melihat modalitas yang sudah banyak dimiliki, secara regulasi Aceh Tamiang juga telah menyusun Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) secara multipihak dengan menggali potensi investasi berkelanjutan. Selain itu, Pemkab Aceh Tamiang juga sudah menjalankan Satu data Indonesia (SDI) dengan penerapan SOP untuk sinkronisasi data multipihak serta dapat mendorong proses bagi pakai data untuk para pemangku kepentingan yang lebih luas.





Upaya Transformasi Integrasi Kawasan Konservasi di Kabupaten Bone Bolango

Kabupaten Bone Bolango yang berada di Provinsi Gorontalo merupakan kabupaten konservasi, sebagai bagian dari Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBW). Bone Bolango memiliki potensi besar dengan sumber daya alam yang dimiliki, seperti perhutanan, kelautan, dan pertanian. Saat ini, komoditas yang diandalkan adalah jagung yang sifatnya monokultur, dan berpotensi menyebabkan banjir serta degradasi lahan.

Dari sisi perencanaan dan kebijakan, Bappeda Kabupaten Bone Bolango sudah memasukkan isu keberlanjutan dalam kebijakan selama 4 periode perencanaan daerah dalam RPJMD. Saat ini, mereka sedang menyusun RPJMD teknokratis akan diturunkan ke RKPD tahun 2025, dengan integrasi keberlanjutan ekosistem, kebijakan penanggulangan kebencanaan, dan kawasan lingkungan. Pemerintah provinsi juga telah merencanakan pembentukan geopark untuk meningkatkan konservasi dan pariwisata yang akan dielaborasi di Kabupaten Bone Bolango.

Bagus Tri Nugroho, Kepala SPTN I Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBNW) menyatakan bahwa terkait pemanfaatan kawasan konservasi di wilayah Bone Bolango, Kementerian LHK membuka ruang akses kelola bagi masyarakat sekitar kawasan konservasi untuk memanfaatkan jasa lingkungan, seperti jasa air dan jasa wisata. "Kami membuka akses untuk izin-izin pemanfaatan air, mendorong masyarakat dan pemerintah desa sekitar kawasan untuk menggali potensi dan mengembangkan kawasan se-

cara bersama-sama dengan Taman Nasional untuk ekowisata," kata Bagus.

Peluang ini direspon oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, dengan mendorong pengembangan ekowisata, bekerjasama dengan Balai Taman Nasional, dan sudah berkomitmen untuk memasukkannya ke dalam perencanaan dan kebijakan pemanfaatan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu), seperti aren, madu, damar, dan getah. Taman Nasional juga telah membuka ruang kelola zona tradisional dengan membuka ruang akses agar masyarakat dapat memanfaatkan aren di kawasan konservasi.

Untuk mengelola potensi sumber daya yang besar sekaligus kawasan konservasi terbesar di Sulawesi, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango membutuhkan lebih banyak mitra untuk berkolaborasi secara multipihak dalam melindungi ekosistem penting. Saat ini, terdapat mitra ada Jaring Advokasi Pengelolaan Sumber Daya Alam (JAPESDA) yang telah bekerja cukup intensif selama dua tahun terakhir di Desa Ilomata, Kecamatan Bulango Ulu, desa yang berdampingan langsung dengan Taman Nasional. Salah satu kontribusinya adalah menjadi bagian dari tim Smart Patrol yang terdiri dari Masyarakat Desa Ilomata, Masyarakat Mitra Polhut Resort Bolango, dan Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, yang bertujuan untuk pemantauan satwa liar dalam rangka konservasi keanekaragaman hayati.

Selanjutnya, proses hasil pemantauan ini hasilnya diolah dan dianalisis lalu diberikan ke Taman Nasional, serta masyarakat dan pemerintah desa akan mendiskusikannya dalam sesi umpan balik. Temuan tersebut belum dipublikasikan ke publik, tetapi disampaikan kepada Balai Taman Nasional, pemerintah desa, pemerintah kabupaten, serta masyarakat dengan membagikan infografis. Selain itu JAPESDA juga aktif memberikan edukasi mengenai konsep agroforestri kepada petani di Desa Ilomata untuk mengatasi pembukaan dan alih fungsi lahan serta mendukung ketahanan pangan.

Nurain Lapolo, Direktur JAPESDA Gorontalo menyatakan bahwa dalam program pendampingan mereka mengajak masyarakat untuk mempertahankan wilayah sumber mata air, agar bisa diwariskan bagi generasi berikutnya, tanpa merusak kawasan konservasi. "Harapannya, semua praktik baik ini bisa direplikasi di daerah lain, dengan cakupan yang lebih luas di Kabupaten Bone Bolango dan Provinsi Gorontalo. Sudah ada komitmen pemerintah untuk memasukkan ke dalam perencanaan dan kebijakan," ujar Ain.

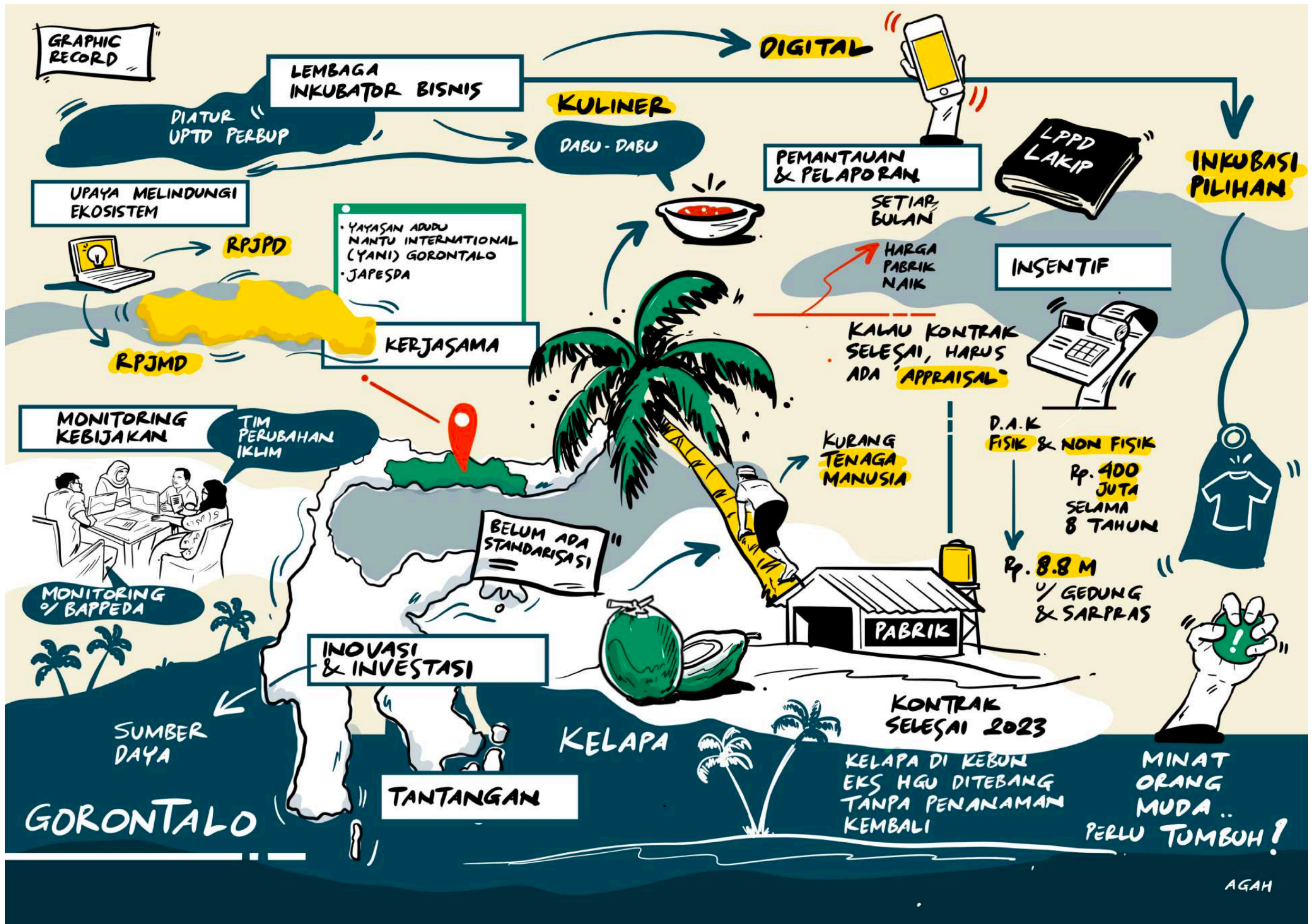
Untuk investasi dan inovasi, Kabupaten Bone Bolango belum memiliki banyak komoditas yang diproduksi secara cukup besar. Potensi aren sedang dikembangkan menjadi nira cair dan gula-gula soba, yang masih diuji coba kualitasnya dan kemasannya dengan pendampingan oleh JAPESDA. JAPESDA melatih perempuan dan kelompok lainnya untuk mengelola potensi aren, durian, dan nangka agar lebih bernilai ekonomi.

Potensi komoditas lainnya, adalah komoditas kopi yang jenisnya hanya ada di lima lokasi di Indonesia. Pohon-pohonnya memiliki nilai historis sebagai peninggalan Belanda yang berada di kawasan taman nasional. Pohon-pohon tersebut sudah tidak produktif lagi, namun bisa dikembangkan menjadi bibit yang ditanam di kebun penduduk di luar kawasan konservasi, dan upaya ini baru dimulai 3-4 tahun lalu, dengan tanaman kopi yang baru mulai berbuah.

Untuk pemantauan dan pelaporan, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango sudah memiliki forum Satu Data Indonesia (SDI) serta telah memiliki portal data publik sendiri dan sudah terkoneksi dengan SDI. Proses pengumpulan data statistik kabupaten sudah dilakukan dengan skema SDI. Saat ini Diskominfo tengah mengembangkan kapasitas sumber daya manusia untuk melakukan pengumpulan dan pengolahan data spasial dengan dukungan dari pihak lain, seperti universitas dan korporasi swasta.

Kabupaten Bone Bolango telah mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) dari pemerintah pusat, serta Dana Peruntukan Khusus Infrastruktur (DIF) dan juga dukungan melalui Corporate Social Responsibility (CSR) dari beberapa perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Bone Bolango. Harapannya, proses kolektif ini tetap membantu dalam pertumbuhan kabupaten lestari dan mandiri.





AGAH

Cerita Sukses dari Gorontalo, Komitmen Perlindungan Ekosistem dan Pengembangan Komoditas Unggulan

Kabupaten Gorontalo di Provinsi Gorontalo, yang bergabung dengan LTKL pada tahun 2019, telah mencatatkan kemajuan signifikan dalam upaya melindungi ekosistem penting di wilayah Kabupaten Gorontalo. Langkah penting itu adalah pembentukan Taman Hutan Raya BJ Habibie seluas 6.208 hektar pada tahun 2022 oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo dengan dukungan Yayasan Adudu Nantu Internasional (YANI), untuk melindungi hutan sebagai ekosistem penting. Keberadaan Tahura ini sejalan dengan fokus kerja YANI, sementara bagi Kabupaten Gorontalo, YANI berperan untuk turut mendorong percepatan SK untuk pengelolaan hutan ini yang masih dalam kewenangan Provinsi Gorontalo dan dukungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), agar kemudian bisa dikelola oleh pemerintah kabupaten.

Untuk mewujudkan kebijakan yang mendukung komitmen berkelanjutan ini, penyusunan RPJPD dan RPJMD di Kabupaten Gorontalo telah melibatkan multipihak seperti lembaga masyarakat sipil dan akademisi. Salah satunya adalah Jaringan Advokasi Pengelolaan Sumber Daya Alam (JAPESDA) yang ikut memberikan masukan dalam penyusunan ini. Dokumen RPJPD adalah pondasi baru yang mengikat komitmen pada keberlanjutan ini sampai tahun 2045. "Penyepakatan komitmen sudah dibangun dalam dokumen

RPJPD dan RPJMD, agar siapapun kepala daerah (Kabupaten Gorontalo) akan *inline* dengan perencanaan ini, sebagai komitmen keberlanjutan kabupaten," kata Viktor Asiku, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo,

Selain dari sisi kebijakan dan perencanaan, Kabupaten Gorontalo juga mendorong inovasi lainnya melalui kelapa, sebagai komoditas yang menjadi unggulan yang dimiliki oleh masyarakat setempat dan masih dikelola secara konvensional. Untuk pengolahannya, telah berdiri pabrik tepung kelapa yang diinisiasi oleh pemerintah kabupaten yang bermitra dengan pihak ketiga. Komoditas kelapa ini berorientasi pada pasar ekspor yang permintaannya cukup besar, sementara untuk pasar lokal masih terbatas pada produk minyak kelapa untuk kuliner Sulawesi yang terkenal seperti *Virgin Coconut Oil* (VCO). Namun dengan dukungan Dana Alokasi Khusus Non-Fisik, Pemerintah Kabupaten Gorontalo saat ini berkolaborasi dengan UMKM dan IKM merencanakan proses standarisasi dan sertifikasi untuk produk turunan dari kelapa ini, agar bisa memasuki pasar yang lebih luas.

Demi membantu percepatan kesiapan portofolio, Kabupaten Gorontalo telah membentuk sentra inkubasi dalam bentuk Matrix UMKM dan

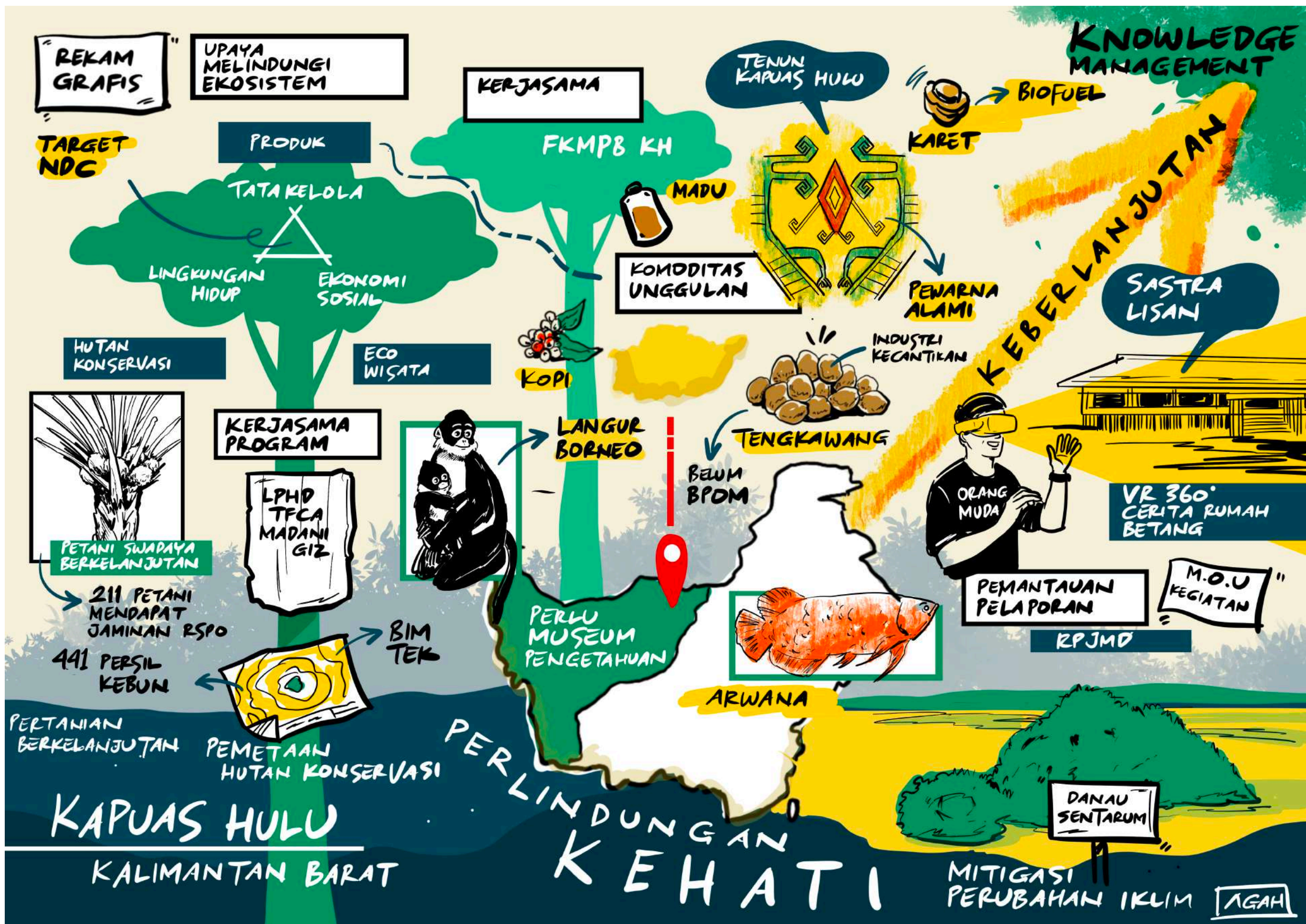
(Pusat Layanan Usaha Terpadu) PLUT di Kabupaten Gorontalo yang saat ini masih dalam tahap rintisan sebelum bisa berfungsi secara optimal. PLUT memberikan layanan inkubasi untuk tiga hal, yakni layanan inkubasi bisnis digital, layanan inkubasi kuliner dan inkubasi pilihan seperti kriya Karawo khas Gorontalo. Kedepannya akan menjadi layanan utama yang didukung oleh lembaga inkubator tersebut. Kemajuan untuk PLUT itu sendiri saat ini dalam proses pembangunan infrastruktur pendukung. Sedangkan untuk lembaga PLUT akan dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) melalui Peraturan Bupati yang sedang dalam proses penyusunan *draft*.

Sementara dari sisi pemantauan dan pelaporan, pemerintah kabupaten Gorontalo menjalankan mandat wajibnya seperti pelaporan LPPD ke Kemendagri, dan LAKIP yang dilaporkan ke Kemenpan, secara periodik sudah dilakukan dan beberapa tahun ini LAKIP dan LPPD Pemkab Gorontalo mendapatkan nilai baik. Selain itu, inovasi model pelaporan juga dilakukan melalui proses imple-

mentasi Kerangka Daya Saing Daerah (KSDS) dan menghasilkan Profil Yurisdiksi yang menjelaskan capaian dan komitmen keberlanjutan Kabupaten Gorontalo pada tahun 2020.

Sumber Daya Manusia (SDM) masih menjadi tantangan utama dalam menjalankan proses transformasi ini, khususnya dalam pembentukan forum multipihak di Kabupaten Gorontalo. Generasi muda yang masih kurang berminat untuk menekuni bidang pemberdayaan sosial secara serius, cukup membuat kabupaten Gorontalo kesulitan mengidentifikasi mitra potensial sebagai bagian dari pembentukan forum multipihak. Minimnya sumber-sumber dukungan finansial dari sektor swasta juga menjadi kendala tersendiri, mengingat keberadaan sektor usaha berskala besar cukup terbatas, dengan mayoritas adalah usaha kecil dan menengah. Namun kehadiran berbagai mitra pembangunan dan akademisi dapat mendorong inovasi dan model kolektif yang lebih optimal dengan pembagian peran yang lebih jelas.





Optimalisasi Peran Kabupaten Konservasi sebagai Dampak Kolektif untuk Masyarakat

Upaya Kapuas Hulu untuk melindungi ekosistem penting telah terakomodir dalam perencanaan dan kebijakan yang komprehensif. Melalui RPJPD 2025-2045 dan revisi RTRW yang mengimplementasikan *green spatial planning*. Kapuas Hulu berfokus tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga mengakomodir status kawasan penting sebagai kabupaten konservasi, bagian dari Heart of Borneo (HoB) dan Cagar Biosfer. Proses penyusunan RPJPD ini melibatkan forum organisasi masyarakat sipil yang memberikan masukan, memastikan RPJPD 20 tahun ke depan dapat mencakup semua kebutuhan.

Untuk mendukung penyusunan RPJPD 2025-2045, Yayasan Madani Berkelanjutan yang baru mulai bekerja di Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2023, berupaya mengintegrasikan isu dan target iklim dalam dokumen perencanaan kabupaten. Upaya peningkatan kapasitas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga dilakukan melalui bimbingan teknis bersama Dinas Pariwisata terkait dengan ekowisata, peningkatan produk unggulan desa bersama Dinas Perindustrian, dengan total peserta dari 35 desa di 12 kecamatan. Madani juga menginisiasi *biofuel* dengan identifikasi bahan baku nabati yang melimpah di Kapuas Hulu, seperti biji karet.

Madani juga mengadakan diskusi kampung untuk menangkap isu kebutuhan masyarakat desa di tingkat tapak serta menjadi masukan RPJPD 2025-2045. Selain itu, melakukan pemetaan in-

ventarisasi hutan alam yang belum terintervensi bersama dengan SIAR di tiga kecamatan dan beberapa desa pemetaan ini untuk melihat tutupan alam yang masih ada serta merencanakan program konservasi yang tepat. Program KOLEKTIF Madani, sudah dilakukan pemetaan kebutuhan data dan informasi terkait 441 persil swadaya seluas 8.885 hektar, guna mempercepat e-STDB petani swadaya untuk mendapatkan ISPO bersama SIAR sejak November 2023 hingga April 2024 di lima desa.

Yayasan WWF Indonesia, meningkatkan kapasitas GAP (*Good Agriculture Practices*) petani sawit swadaya, dengan hasil 201 petani sudah mendapat sertifikasi RSPO, dan 211 petani lainnya sedang dalam proses sertifikasi ISPO. Bersama Kementerian Pertanian sedang menginisiasi mendorong pertanian cerdas iklim atau *climate smart agriculture*, memperkuat pertanian tradisional masyarakat, di empat desa yang mempraktikkan pertanian organik. WWF sedang menginisiasi program pengembangan usaha berbasis lingkungan terutama di kawasan Koridor Betung Kerihun, serta membantu masyarakat adat mendapatkan pengakuan wilayah melalui pengelolaan wilayah adat bersama dengan AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara).

Mitra pembangunan lain, Tropical Forest Conservation Action (TFCA), sejak *kick-off* perdana tahun 2014 hingga kini telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi program dengan pemer-

intah kabupaten Kapuas Hulu. Setiap program yang dilaksanakan sudah tercatat di pemerintah kabupaten dan desa yang menjadi sasaran intervensi juga telah dikoordinasikan dengan Bappeda, Dinas Pembinaan Masyarakat Desa, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas Pariwisata. TFCA telah bekerja di total 35 desa di 12 kecamatan, dengan fokus program pada tiga pilar; pengelolaan lingkungan hidup, ekonomi sosial, dan tata kelola hutan.

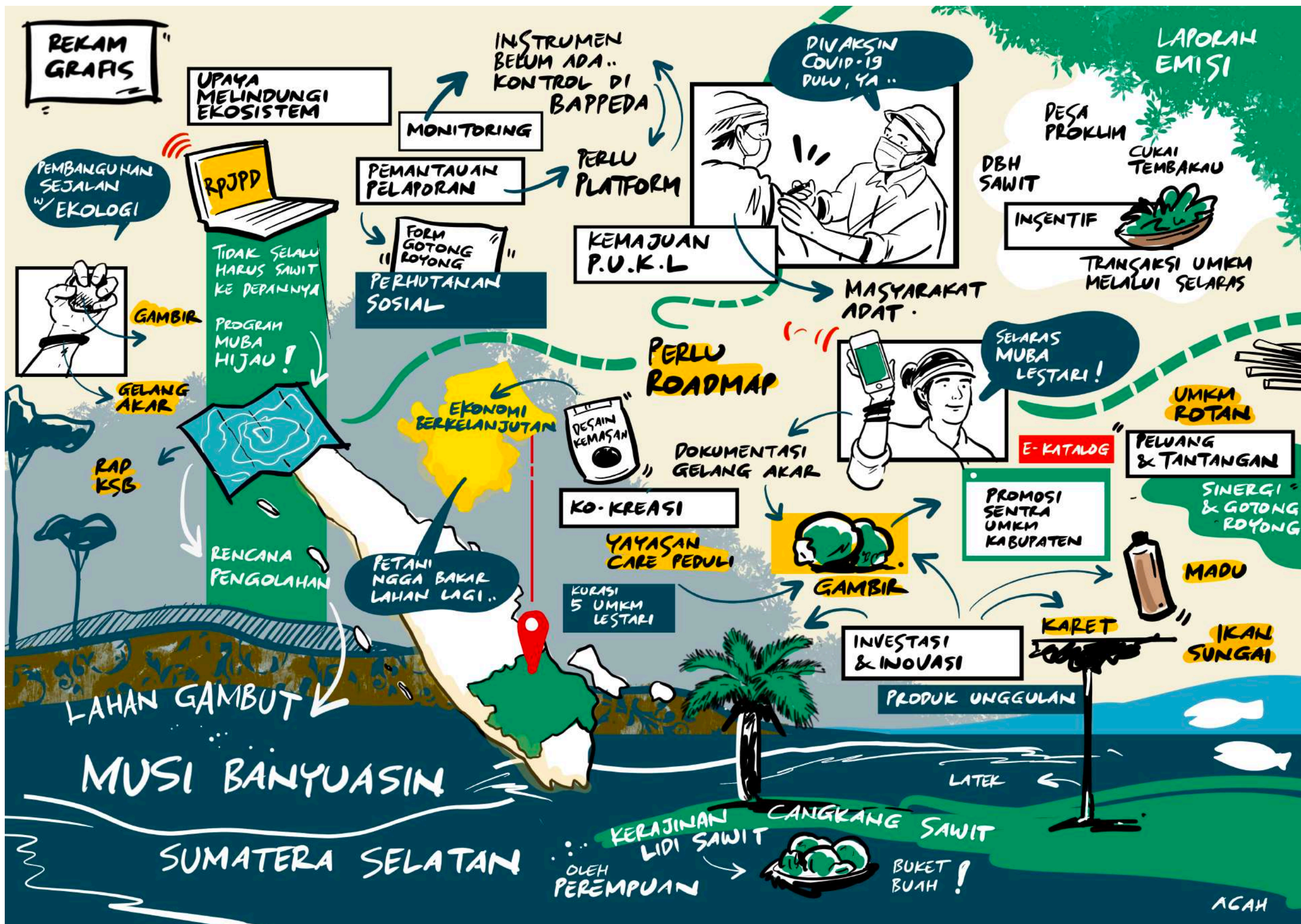
FORMASI, yang terdiri dari 17 lembaga, mengadakan pertemuan rutin per tiga bulan sebagai wadah silaturahmi dan update, untuk memudahkan sinkronisasi inisiatif di Kapuas Hulu, serta memudahkan terjun ke masyarakat dengan tujuan yang sama. FORMASI membuka peluang kolaborasi, salah satunya antara Madani dan Riak Bumi dan Forum Koordinasi Multipihak Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Kapuas Hulu (FKMPB KH) menjadi forum induk untuk forum-forum multipihak lainnya.

Untuk pelibatan orang muda, di Kapuas Hulu sudah dilakukan proses ko-kreasi bersama anak muda dalam bentuk VR 360 yang bisa digunakan untuk melihat tiga rumah betang dengan cerit-

anya masing-masing. Inisiatif Merapah Banua <https://merapahbanua.com/> sebagai gerakan lebih mengenal dan mempromosikan ekowisata Kapuas Hulu bersama dengan Putussibau Art Community (PAC). Komunitas ini juga membuka ruang kolaborasi untuk menampilkan karya serta dokumentasi sastra lisan sebagai salah satu bentuk kearifan lokal yang penuturnya sudah mulai berkurang.

Salah satu komoditas basis alam seperti Tenun Kapuas Hulu memiliki nilai budaya yang sangat tinggi. Dian, sebagai penggiat dan dokumentasi tenun, telah melakukan pendampingan kepada pengrajin tenun di delapan kampung. Ia bekerja sama dengan Pendopo untuk melakukan *social mapping* hingga tahun 2025, dengan harapan dapat mendatangkan *exposure* serta membuka peluang kolaborasi yang lebih luas. Upaya ini bertujuan untuk melestarikan warisan budaya sekaligus meningkatkan kesejahteraan para pengrajin tenun melalui berbagai program pendampingan dan promosi. Dengan dukungan dari berbagai pihak, tenun Kapuas Hulu diharapkan dapat dikenal lebih luas dan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat lokal.





Muba Hijau, Upaya Transformasi dalam Melindungi Ekosistem Penting dan Peningkatan Ekonomi Berbasis Masyarakat

Perlindungan ekosistem penting di Kabupaten Musi Banyuasin (MuBa) penting dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi kebakaran hutan dan lahan gambut yang kerap terjadi. Upaya ini termanifestasi dalam konteks kebijakan MuBa Hijau, yang sudah diturunkan dalam bentuk Peraturan Daerah MuBa Hijau. Selain itu, bersama dengan Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut KLHK, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin juga akan menyelesaikan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG).

ICRAF (The International Council for Research in Agroforestry) bekerja sama dengan pemerintah kabupaten melalui program Land4Lives, yang fokus pada ekosistem gambut dan pemberdayaan masyarakat, terutama menyoar kelompok perempuan. Sebagai kabupaten yang didominasi oleh perkebunan kelapa sawit, MuBa bersama mitra pembangunan seperti ICRAF tengah menyusun Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) yang sejalan dengan komitmen MuBa Hijau.

Adios Syafri dari HaKi (Hutan Kita Institute) menyatakan bahwa secara kelembagaan mitra pembangunan telah berkontribusi pada Kabupaten

MuBa untuk pencapaian MuBa Berkelanjutan 2030 terkait indikator keberlanjutan. HaKi memantau hutan alam dan deforestasi di MuBa untuk mengurangi stigma negatif terhadap kelapa sawit di kawasan hutan, seperti intervensi melalui skema perhutanan sosial. RPJPD sebagai salah satu dokumen perencanaan sudah memasukkan salah satu visi keberlanjutan yang sudah digariskan dari nasional dan provinsi. Visi ini harus didukung program operasional di lapangan untuk hutan, gambut, dan air. Pemkab oleh masing-masing OPD, nantinya akan berkolaborasi dengan berbagai stakeholder terkait untuk mengelola kawasan hutan dan gambut agar memiliki nilai tambah dalam sektor ekonomi.

Amrah Syarif dari Bappeda menyatakan bahwa penyusunan dokumen perencanaan di Kabupaten MuBa sudah melibatkan multipihak, dengan menyusun target kinerja pembangunan berkelanjutan. Hal ini, mengacu pada beberapa kabupaten anggota LTKL yang sudah membuat peraturan pembangunan berwawasan lingkungan. Namun, kebijakan ini belum disosialisasikan, karena belum ada rencana aksi atau *roadmap*.

Pusat Unggulan Komoditas Lestari (PUKL) sebagai forum multipihak di Kabupaten MuBa,

berperan penting dalam mewujudkan tata kelola perkebunan berkelanjutan. Sejak Juni 2023 sampai sekarang, PUKL banyak memfasilitasi berbagai komunikasi mitra pembangunan, seperti; Bappenas dan Bimbingan Teknis penyusunan peta jalan barang dan jasa lestari. PUKL juga bekerja sama dengan komunitas dan mitra pembangunan seperti Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Yayasan Care Peduli (YCP), serta komunitas orang muda dalam mewujudkan visi bersama MuBa Hijau. Pemerintah mengapresiasi peran PUKL yang membantu mengkolaborasi program pemerintah dengan pihak lain yang memiliki visi dan misi serupa. PUKL mendorong semua pihak di MuBa, baik pemerintah, non-pemerintah, maupun swasta untuk bersama-sama mendorong keberlanjutan.

Selain itu, inovasi model insentif, Kabupaten MuBa juga mendorong Transfer Anggaran Berbasis Ekologi (TAKE) sebagai salah satu bentuk insentif ke desa, bagaimana desa menjaga lingkungannya berdasarkan indikator yang berfokus pada pengolahan sampah. Namun, kendala yang dihadapi saat ini adalah perlunya peraturan terkait keuangan agar skema transfer insentif ke desa bisa berjalan efektif. Peraturan ini sedang digodok untuk memastikan program ini berjalan lancar. Pelibatan masyarakat sangat penting dalam mendorong komitmen keberlanjutan MuBa, namun alokasi insentif yang belum berjalan menghambat implementasi penuh, sehingga diperlukan pendekatan yang mendorong masyarakat dan desa untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan berkelanjutan.

Hal tersebut juga didukung dengan Kabupaten MuBa telah mendapatkan insentif dari pemerintah pusat melalui Dana Bagi Hasil sawit dan insentif untuk petani yang membuka lahan tanpa membakar. Terdapat 34 desa program kampung iklim (Proklim) di MuBa yang sudah mendapatkan insentif.

Untuk pelaporan dan monitoring, Musi Banyuasin telah memiliki Forum Satu Data. Namun, Instrumen monitoring dan evaluasi belum tersedia, sehingga fokus monitoring dan pelaporan masih berlangsung di internal kelembagaan mas-

ing-masing. HAKI sebagai mitra pembangunan secara reguler memonitor deforestasi hutan dan kebakaran hutan di MuBa. PUKL bekerja sama dengan WRI untuk pelaporan dan monitoring, terkait tutupan lahan ini program lanjutan dari tahun 2021-2022. MuBa juga telah mempublikasikan Profil Yurisdiksi sebagai bentuk publikasi kemajuan keberlanjutan.

Musi Banyuasin juga saat ini didukung oleh sekumpulan orang muda yang tergabung dalam SELARAS, Inkubasi Usaha Lestari di Kabupaten MuBa telah melakukan kurasi inovasi untuk 20 UMKM, dengan 5 UMKM yang didampingi secara intensif. Pendampingan meliputi legalitas, *repackaging* desain produk hutan seperti madu hutan, kain gambo, serta kolaborasi dengan pelaku UMKM dan YCP terkait inovasi kerajinan lidi sawi. Sejak Juni 2023 - Mei 2024, tercatat transaksi senilai Rp 40 juta dari dua komoditas, yakni madu hutan dan kriya yang memberikan dampak signifikan bagi masyarakat lokal.

Kedepannya, kolaborasi multipihak di MuBa perlu diperkuat dengan menciptakan sinergi yang mendukung tujuan bersama, melalui platform bersama untuk memantau dan saling bersinergi dalam mendorong MuBa lestari berkelanjutan. Orang muda di MuBa melihat banyak peluang, namun dukungan masih minim, sehingga diperlukan peningkatan komitmen dan sinergi bersama agar keberlanjutan dapat tercapai.





Aksi Kolektif dalam Mendorong Sanggau yang Inovatif dalam Melindungi Ekosistem Penting

Dalam dua dekade terakhir, ekosistem penting Kabupaten Sanggau semakin tergerus akibat konversi lahan untuk perkebunan kelapa sawit skala besar. Kerusakan ekosistem ini menyebabkan banjir kerap terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Sanggau. Sebagai upaya perlindungan ekosistem penting, kemudian dilakukan melalui kolaborasi beragam mitra pembangunan yang tergabung di sentra multipihak Sabang Merah Berdempu. Para mitra pembangunan seperti: USAID Segar, The Food Systems, Land Use and Restoration (FOLUR), KPH Sanggau Barat, serta KPH Sanggau Timur, serta mitra-mitra yang tergabung dalam Sabang Merah Berdempu, terlibat dalam intervensi kebijakan inovatif seperti RAD-KSB dan RPJPD yang mengintegrasikan sistem keberlanjutan di Kabupaten Sanggau.

Sabang Merah Berdempu, sebagai forum multipihak, telah menempati aset pemerintah sebagai kantor sekretariat, meski SK pembentukannya masih dalam proses. Forum ini sangat membantu fungsi pemerintah dan memberikan dampak positif bagi Kabupaten Sanggau, dengan melibatkan mitra dalam proses perencanaan aksi, menyampaikan ide dan gagasan, melakukan identifikasi lapangan, serta melakukan implementasi program.

Proses pelibatan mitra ini dilakukan sejak perumusan rencana hingga intensif memberikan masukan dalam penyusunan perencanaan. Saat ini RPJPD sedang dalam proses penetapan per-

da, beserta dokumen D3TLH dan RPPLH yang sedang dalam proses validasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. RAD KSB telah dilegalisasi melalui Perbup no 56 tahun 2022, dengan proses penyusunan yang melibatkan Bappeda dan Dinas Perkebunan sejak awal hingga ke dalam sistem penganggaran.

“Kita sudah menyampaikan laporan ke Kemendagri, tahapan tim pelaksana adakan pertemuan FGD setiap enam bulan sekaligus menyampaikan laporan dari masing-masing *stakeholder*, mengundang semua OPD terkait sebagai pelaksana dan pihak perusahaan. Saat ini sedang dalam proses Perda untuk Kelapa Sawit Berkelanjutan, tahap pembahasan hampir finalisasi di DPRD dan sudah dibahas dengan Dirjen Perkebunan di Jakarta,” papar Emiliana, Sekretaris Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau.

Pengembangan komoditas berkelanjutan juga dilakukan sebagai kontribusi terhadap komitmen *Nationally Determined Contribution* (NDC), dengan dukungan UNDP melalui proyek FOLUR yang bertujuan mentransformasi pengelolaan sistem pangan dan lanskap berbasis rantai pasok komoditas berkelanjutan. Selain itu, Sanggau terpilih menjadi pilot uji coba toolkit pendekatan Nilai Konservasi Tinggi (SKT-NKT) bersama SPKS, yang memberikan panduan praktis bagi petani kecil dalam mengidentifikasi dan mengelola hutan serta kawasan konservasi secara berkelanjutan

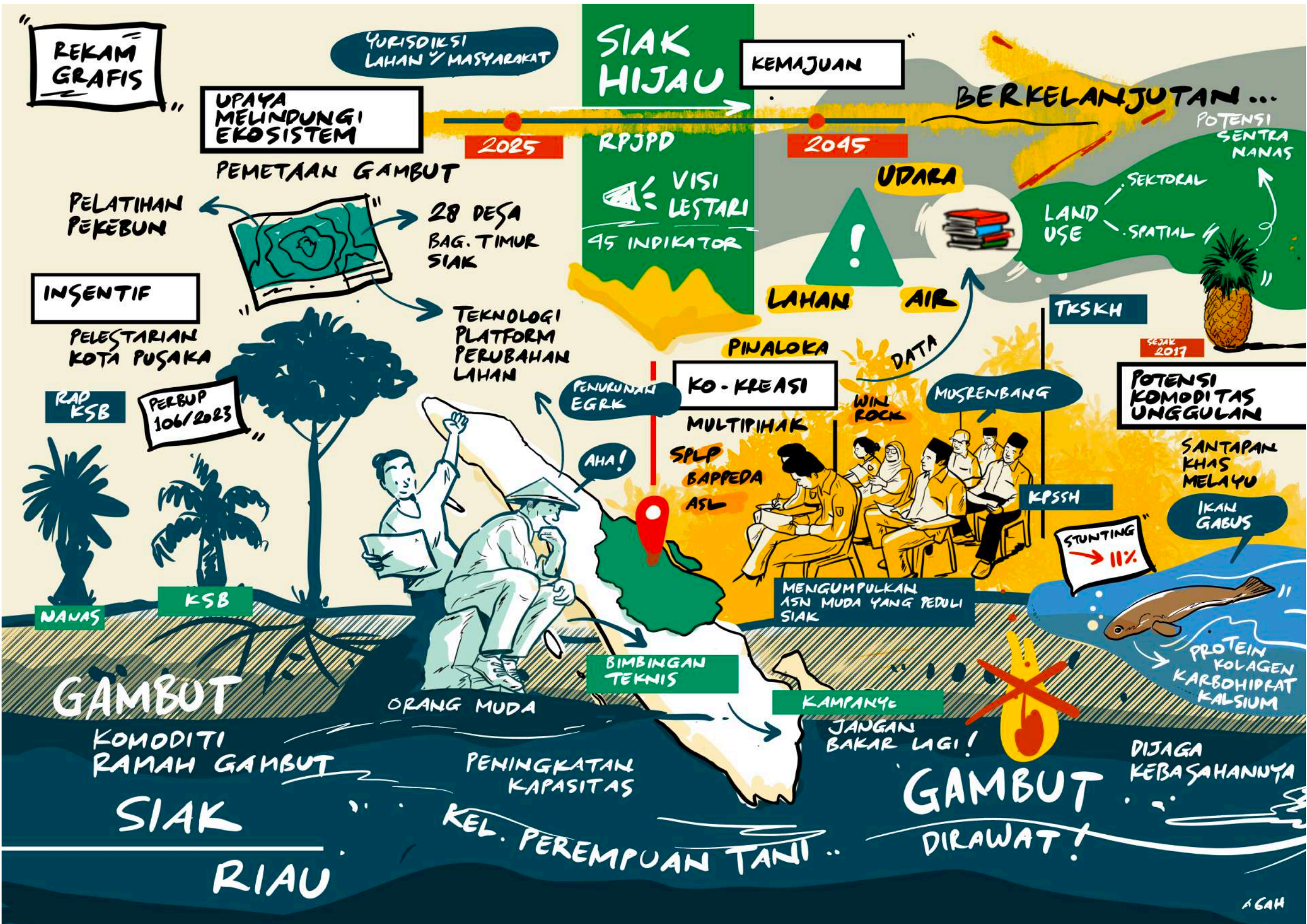
Ir. Yulia Theresia, Kepala Bappeda Kabupaten Sanggau menyatakan bahwa pada RPJMD 2019-2024 Pemkab Sanggau berfokus untuk memperkuat Masyarakat Hukum Adat (MHA), MHA merupakan skema perhutanan sosial melalui hutan adat yang akan dikelola oleh masyarakat dan ditetapkan oleh Kementerian LHK. “Program ini terus kita lakukan dan masukan dalam dokumen perencanaan kita. Animo Masyarakat Hukum Adat bagus sekali, dorongan itu yang perlu kita berikan. Bahkan yang berkembang hutan desa juga diproses di KLHK yang melakukan inventarisasi gas rumah kaca. Semangat masyarakat sangat baik untuk turut bersama pemerintah melindungi ekosistem penting ini,” kata Yulia.

Tak hanya itu, upaya perlindungan ekosistem penting lainnya adalah melalui pengelolaan Taman Kehati seluas 25 hektar oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau, yang telah dilegalisasi dengan SK Bupati Sanggau 551/2019. Dalam pengembangan ekowisata, USAID SEGAR membantu penyusunan profil dan Rencana Induk Taman Kehati. Selain itu, terdapat skema insentif Transfer Fiskal Berbasis Ekologi dari Kabupaten ke Desa atau biasa yang disebut dengan TAKE yang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPM Pemdes) terkait dengan pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) berbasis kinerja lingkungan yang telah disahkan melalui Perbup no. 59/2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa.

Inovasi lainnya, Kabupaten Sanggau saat ini telah memiliki kumpulan orang muda yang tergabung dalam Samudera Bekudong'k, yang merupakan sentra inkubasi pelaku usaha lokal di Kabupaten Sanggau yang memanfaatkan komoditas perhutanan sosial bekerjasama dengan KPH Sanggau Timur dan Dinas Perkebunan dan Peternakan. Komoditas unggulan yang sedang dikembangkan di Sanggau selain sawit adalah aren, tengkawang, kakao, dan kopi. Saat ini terdapat tantangan untuk memutus rantai pasok yang panjang. Komoditas tengkawang bahkan menginspirasi orang muda di Sanggau untuk membuat film berjudul “Tengkawang”.





Siak Kabupaten Hijau, Komitmen Lindungi Lahan Gambut dan Pengembangan Inovasi Komoditas Ramah Gambut

Kabupaten Siak memiliki wilayah ekosistem penting yang didominasi oleh lahan gambut, yang memerlukan pendekatan unik dan model proteksi yang holistik agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan. Budhi Yuwono, Kepala Bappeda Kabupaten Siak mengatakan bahwa inisiatif Siak Hijau dimulai tahun 2015 setelah terjadinya kebakaran dengan rendahnya tingkat kepedulian masyarakat dalam perlindungan gambut. Pada tahun 2016 bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Siak Hijau diluncurkan, diikuti dengan pembentukan Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) bersama kabupaten lainnya pada tahun 2017. Langkah berikutnya adalah penyusunan peta jalan Siak Hijau dengan adanya klusterisasi kabupaten Siak yang terbagi menjadi beberapa zonasi seperti zona konservasi dan ekonomi.

Peraturan Bupati Siak Kabupaten Hijau disahkan pada tahun 2018 dan saat ini sudah beralih menjadi Peraturan Daerah dengan kekuatan hukum yang lebih kuat. Setelah itu, disusul dengan pembentukan Tim Koordinasi Siak Kabupaten Hijau (TKSKH). TKSKH bertujuan untuk melakukan sinkronisasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mitra pembangunan, serta pelaporan program maupun kegiatan secara berkala di Kabupaten Siak. Pembentukan TKSKH didukung oleh Teras Riau, Sedagho Siak yang merupakan gabungan 21 mitra pembangunan, Kito Siak yang mewakili komunitas, serta Koalisi Private Sektor untuk Siak Kabupaten Hijau (KPPSH).

Penyusunan perencanaan Kabupaten Siak sudah melibatkan multipihak, seperti pada RPJPD 2025-20245 yang mengacu pada komitmen keberlanjutan Siak Hijau. Beberapa dokumen pendukung juga difasilitasi oleh mitra dalam

penyusunannya, termasuk praktik baik perkebunan, penanganan kebakaran hutan di lahan gambut dan cara menjaga gambut tetap basah di perkebunan kelapa sawit. “Di setiap tahapan kita melibatkan semua pihak, konsultasi publik pertama kedua dan bagaimana kita menyusun semua komponen kita libatkan dalam pertemuan dan diskusi, dan Musrebang RPJPD” kata Budhi Yuwono, Kepala Bappeda Kabupaten Siak.

Teras Riau dan Fitra Riau turut mendukung program pemerintah melalui kebijakan inovatif Transfer Anggaran Berbasis Ekologi (TAKE) yang mensinergikan Siak Hijau dengan pemerintah kampung untuk meningkatkan lingkungan hidup dan ekonomi. TAKE dinilai melalui indeks kampung hijau untuk penyaluran Alokasi Dana Kampung.

Jimmy Wilopo, Landscape Project Manager Daemeter dan Co-Lead Siak-Pelalawan Landscape Programme (SPLP), mengatakan bahwa bekerja di ekosistem gambut dimulai dari pemetaan untuk mengetahui lokasi yang masih memiliki gambut dan bekerjasama dengan pemerintah desa. SPLP yang juga didukung oleh beberapa perusahaan sudah bekerja di 28 desa di sisi bagian timur Kabupaten Siak, yang masih tersisa ekosistem gambut dan ekosistem alami lainnya. SPLP juga menyusun profil desa dan kegiatan lapangan partisipatif bersama masyarakat, dengan pelatihan perkebunan yang baik pada kondisi lahan gambut, mendukung pekebun agar mendapatkan sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan, memfasilitasi pekebun terkait dengan *cross-learning* dan bekerjasama dengan *World Resource Institute* (WRI) dengan mengembangkan teknologi/platform pemantauan perubahan

lahan. Selain itu, SPLP juga turut terlibat dalam mendorong penyusunan RAD-KSB secara multipihak bersama TKSKH.

Mitra pembangunan lain, *Winrock International* (Wineco), telah melakukan pelatihan emisi dan pengukuran emisi gas rumah kaca, mengumpulkan data ekologis di desa-desa dampingan, dan pendampingan pengembangan komoditi di Kecamatan Sungai Apit, seperti komoditi sagu dan nanas, berkolaborasi bersama Sedagho Siak.

Inovasi Komoditas Ramah Gambut

Cindy Shandoval, orang muda Siak, mendirikan Pinaloka sebagai unit usaha untuk mensukseskan visi Siak Hijau. Pinaloka mengolah produk-produk turunan dari nanas, yang bermanfaat secara ekologi karena merupakan komoditi yang mampu menjaga manajemen air di lahan gambut. Tak hanya itu, Pinaloka melakukan pemantauan dari hulu ke hilir untuk memastikan produksi buah nanas dari lahan gambut sudah sesuai kualitasnya. Bersama Laboratorium Inovasi Siak yang tergabung dengan Alam Siak Lestari (ASL), telah bekerjasama di area demplot percontohan kerja kolaborasi dengan SPLP (Daemeter dan Proforest) untuk mengembangkan percontohan tanaman nanas yang benar. “Pinaloka fokus di tengah dan hilir, dan kami bermitra dengan Kelompok Wanita Tani di tiga desa di Kecamatan Sungai Apit,” kata Cindy.

Pinaloka yang berdiri di akhir tahun 2023, bersama dengan pemerintah dan mitra pembangunan masuk ke desa untuk mendampingi produk turunan nanas. Pinaloka membantu material dan kemasan, sementara dari tim produksi yang didampingi harus mengikuti SOP produksi dari Pinaloka dari pengolahan hingga standar rasa. Hasilnya adalah produk retail seperti selai nanas, sirup nanas, *dry pineapple*, dan minuman nanas.

Alam Siak Lestari (ASL) menjadi pelopor pengolahan ikan gabus dan produk turunannya. Ini berasal dari tradisi lokal di desa Orang Melayu dimana ibu melahirkan biasa makan ikan gabus, yang mengandung albumin dan dapat mempercepat pemulihan. Melalui kerjasama dengan Pemkab Siak, dana desa digunakan oleh beberapa desa

untuk pengembangan budidaya ikan gabus. ASL membutuhkan kerjasama bahan baku yang tak hanya dari budidaya di desa, tapi juga penangkapan dari alam yang dapat ditelusuri dari sumber mana dan bagaimana cara tangkapnya, dan ASL dapat memberikan bantuan teknis cara pembudidayaan yang baik.

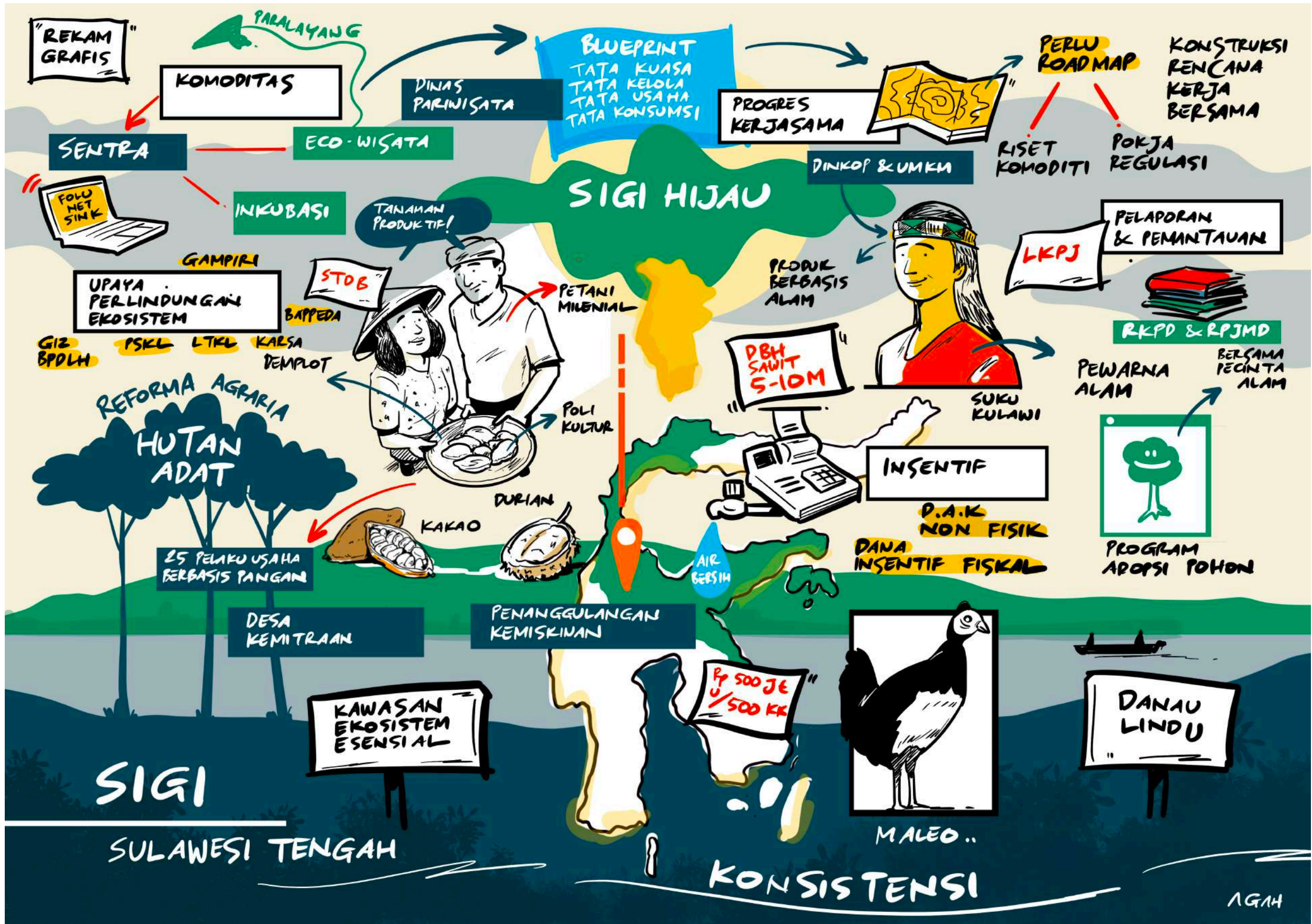
SKELAS (Sentra Kreatif Lestari Siak) merupakan sentra inkubasi yang diinisiasi oleh orang muda untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui solusi kreatif berbasis ekonomi lestari dan pelestarian budaya. SKELAS saat ini mendampingi 7 UMKM dengan jenis usaha kuliner, jamu, kriya, serta jasa. Terdapat 23 UMKM aktif yang produknya telah ditampilkan dan dibantu pasarkan melalui Kantin SKELAS, dimana lokasi tersebut berada di Tangsi Belanda yang didapatkan dari dukungan Pemerintah Kabupaten Siak.

Seiring berjalannya proses inovasi dan kreatifitas ini, #SiakAsik menjadi ekspresi yang muncul saat orang-orang datang ke Siak. Dari hutan gambut hingga sungai yang membentang, setiap sudut Siak menyimpan cerita sejarah yang menarik untuk ditelusuri. Menelusuri Siak bukan hanya tentang menemukan tempat-tempat indah, namun tentang memahami dan menghargai lingkungan, sejarah, dan budaya.

Dengan semua modal kuat yang dimiliki Siak, muncul ragam inisiatif dan inovasi dari pemerintah daerah, orang muda, pelaku usaha, masyarakat, serta mitra-mitra pembangunan. Inisiatif dan inovasi tersebut perlu dirajut dan dirawat agar tetap tumbuh.

Keindahan alam, kekayaan sejarah dan inovasi yang hadir dari kolaborasi yang terajut, menjadikan Siak ASIK untuk semua.





Kabupaten Sigi, Lindungi Ekosistem Penting dengan Sigi Hijau

Kabupaten Sigi Lindungi Ekosistem Penting dengan Sigi Hijau

Di Kabupaten Sigi upaya untuk melindungi ekosistem penting dipicu oleh bencana yang berkaitan dengan perubahan iklim, seperti banjir bandang dan kekeringan. Bencana ini semakin berdampak parah bagi masyarakat akibat rusaknya infrastruktur akibat gempa dan likuifaksi tahun 2018. Sebagai respon, Kabupaten Sigi berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memiliki program inovasi untuk ketahanan bencana.

Pemerintah kabupaten Sigi dan mitra pembangunan sepakat bahwa perlindungan ekosistem penting harus dilakukan melalui model pembangunan berkelanjutan yang mendorong lahirnya Perda Sigi Hijau pada Oktober 2018, tepat dua minggu setelah bencana. Perda ini bertujuan melembagakan pembangunan berkelanjutan dan mengadopsi pola pembangunan hijau di Kabupaten Sigi. Untuk menunjang implementasi regulasi ini, diperlukan peta jalan pencapaian Sigi Hijau yang dilaksanakan secara bertahap. Kolaborasi multipihak juga sedang berjalan paralel dilakukan untuk mengembangkan Peta Jalan Sigi Hijau sebagai acuan dalam menerapkan pembangunan berbasis konservasi dan inovasi di Kabupaten Sigi.

Ko-kreasi penyusunan perencanaan secara multipihak seperti RPJPD yang mengacu pada komitmen keberlanjutan kabupaten Sigi Hijau, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dengan Bappeda sebagai *leading sector*. Pihak



yang terlibat antara lain; perguruan tinggi, tim ahli, dan masyarakat melalui Musrenbang untuk memformulasi dokumen perencanaan jangka panjang yang terintegrasi dengan strategi, visi, misi dari RPJPD. "Kerja-kerja kolaboratif di Sigi sudah cukup maju dengan model pembangunan kolaboratif para pihak," kata Edy Wicaksono dari KARSA Institute.

Selain itu, untuk mekanisme pelaporan terintegrasi, Muhammad Jauhari, Kabid Bappeda Kabupaten Sigi, mengatakan bahwa pelaporan dan monitoring pemerintahan lewat RKPD dan RPJMD serta pelaporan rutin setiap tahun dilaporkan ke Kemendagri. Selain itu, Kabupaten Sigi juga telah mempublikasikan profil yurisdiksi dari proses Kerangka Daya Saing Daerah yang diluncurkan pada Festival Lestari 5 tahun 2023 yang lalu.

Kelembagaan multipihak Sigi Hijau mewadahi kerja bersama para mitra di Sigi melalui pertemuan rutin bulanan, dengan pembagian 5 kelompok kerja. Adanya forum multipihak ini se-

makin banyak menarik mitra untuk berinvestasi di Sigi, salah satunya dengan melakukan riset komoditi dan kebijakan.

Salah satu contoh kolaborasi multipihaknya adalah kerjasama KARSA Institute sebagai mitra pembangunan lewat beberapa program strategis seperti skema perhutanan sosial, seperti, (I) Hutan Adat, (II) Hutan Desa, (III) Hutan Kemasyarakatan, (IV) Kemitraan Kehutanan, dan (V) Hutan Tanaman Rakyat. KARSA Institute memfokuskan kerja mereka di skema hutan 1-4, karena hutan tanaman rakyat lebih berorientasi pada *lodging*. Di Sulawesi Tengah terdapat enam hutan adat yang sudah diakui negara, lima diantaranya berada di Kabupaten Sigi. Proses pengakuan dan pengukuhan kelima lokasi tersebut difasilitasi dengan kolaborasi mitra pembangunan KARSA Institute.

Inovasi dan Investasi

Dari sisi investasi di Kabupaten Sigi telah diatur dalam dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM). Sedangkan, untuk mengimplementasikannya telah melibatkan kelompok orang muda seperti Gampiri, dalam bentuk sentra inkubasi produk turunan berbasis alam dan *trading hub* yang menghubungkan petani dengan perusahaan. Gampiri telah berkolaborasi dengan Dinas Perkebunan dan Dinas Pariwisata di Kabupaten Sigi dan mitra perusahaan seperti Java Kirana, Conservana dan Katalys-Agridesa.

Ryan dan Nedy, mewakili orang muda dari Gampiri mengatakan, kontribusi sentra inkubasi sangat membantu dalam kelembagaan multipihak, melalui pemetaan inisiatif mitra. Gampiri dapat memetakan kebutuhan kolaborasi melalui perspektif konservasi komoditas unggulan terutama berfokus pada pengembangan produk hasil hutan bukan kayu yang diolah menjadi peluang alternatif bagi masyarakat sekitar. Pengembangan tersebut bertujuan agar mampu menjaga keseimbangan kawasan *buffer zone* Taman Nasional Lore Lindu dengan berkolaborasi bersama mitra lokal, nasional, hingga global. Saat ini, Gampiri telah melakukan program inkubasi dengan 19 pelaku usaha dan melahirkan 13 produk inovasi turunan berbasis alam.

Terdapat inovasi lainnya melalui aksi adopsi pohon yang memberikan insentif untuk melindungi hutan. Inisiatif ini menghubungkan orang-orang di kota yang ingin mengadopsi pohon dengan masyarakat di Hutan Ranjuri, Desa Bekka, Kabupaten Sigi. Setiap orang yang mengadopsi pohon akan mendapatkan sertifikasi adopsi dengan deskripsi tentang kondisi pohon yang diadopsi selama satu tahun.

Kabupaten Sigi juga menerima insentif publik dari pemerintah nasional seperti Dana Bagi Hasil, Dana Insentif Daerah dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Salah satunya yang disalurkan melalui Gampiri Interaksi Lestari sebagai sentra inkubasi daerah. Insentif Fiskal lainnya juga ditujukan untuk perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat miskin ekstrem, penanganan stunting, dan layanan dasar seperti air bersih. Selain itu, juga terdapat bantuan modal usaha 10 juta untuk 500 KK miskin melalui dinas sosial lewat program Sigi Masagena

Dari sisi perkebunan, Sigi tahun ini mendapat alokasi percepatan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Perkebunan untuk tanaman kakao, guna memastikan sistem penelusuran dan data yang valid khususnya dalam memastikan tidak adanya tumpang tindih di kawasan konservasi. Dinas Perkebunan Kabupaten Sigi juga mendampingi para petani agar melakukan penanaman polikultur dan agroforestri, agar petani tidak membuka lahan lagi. Dengan menanam lebih dari satu tanaman, memungkinkan petani memiliki dua sumber ekonomi sekaligus mengurangi biaya perawatan. Kemitraan yang dijalin dengan PT. Olam Indonesia juga menanam kakao di lokasi-lokasi rentan abrasi.

Secara keseluruhan, peluang di Kabupaten Sigi cukup besar dengan modalitas yang meliputi kekayaan alam khususnya kawasan hutan yang luas. Tantangan berikutnya adalah meningkatkan kolaborasi multipihak agar bisa berkontribusi saling melengkapi dan menghindari tumpang tindih. Peluang bagi orang muda juga cukup besar dengan minat dan keaktifan mereka dalam program Sigi Hijau.

REKAM GRAFIS

UPAYA MELINDUNGI EKOSISTEM

YUK, DUDUK BERSAMA ..

KEMAJUAN SEKBER

RPJPD 2025-2045

SEJAHTERA MAJU & BERKELANJUTAN



KOLABORASI DATA

PEMBAGIAN PERAN

sintang.go.id

PEMERINTAHAN KOLABORATIF

PERBUP 41/2024

SINTANG LESTARI RPPLH



PERDA 12/2015

DOKUMENTASI

TATA RUANG WILAYAH SINTANG

PERDA 20/2015

PERBUP 87/2018

PENDAMPINGAN PETANI & MASYARAKAT ADAT



TENGGAWANG TUNGKUL

DARI 82.607 Ha AREA HUTAN 1.427 Ha JADI RIMBA GUPUNG

RAP KSB

KERJASAMA

PLATFORM ADUAN SAMPAH

PELAPORAN & PEMANTAUAN

PERBUP 70/2023

INVESTASI & INOVASI

INKUBASI

INSENTIF

NGO BERMANFAAT

FKMS KALFOR USAID ERAT RAINFOREST ALLIANCE LESTARI WWF LTKL

SEKBER CSR AWARD

MONEY

2.1 JUTA Ha HARUS AMAN KONSERVASINYA

PANAU SEMETUNG



TANJUNG BAUNG

HCV

SINTANG KALIMANTAN BARAT

HIGH CONSERVATION VALUES

KEBERLANJUTAN

AGAH

Kepemimpinan, Kunci Sukses Sintang Lestari

Kabupaten Sintang di Provinsi Kalimantan Barat, adalah contoh praktik baik keberhasilan kolaborasi multipihak dalam mewujudkan kabupaten lestari. Banyak kisah sukses dari Sintang yang menginspirasi dan semua bermuara pada satu hal yang mendasar, yakni pentingnya peran kepemimpinan dalam mendorong kerja kolaboratif ini dapat ter-orkestrasi dengan baik.

Inovasi kebijakan yang dikembangkan di Sintang sudah sangat baik, seperti upaya Sintang dalam melindungi ekosistem penting sudah tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RPJPD 2025-2045 dengan visi “Sintang Sejahtera Maju dan Berkelanjutan” dengan proses sinkronisasi dengan KLHS dan melibatkan forum multipihak Sintang, Sekretariat Bersama. Selain itu, inovasi lainnya juga dengan adanya Peraturan Bupati Sintang No. 122 tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengusulan dan Penetapan Pengelolaan Rimba/Gupung di luar kawasan hutan oleh masyarakat. Selama tahun 2022 hingga 2023 terdapat 1.445 hektar lahan yang sudah ditetapkan melalui penetapan Bupati sebagai Rimba/Gupung. Penetapan Rimba Gupung bertujuan agar ATR/BPN tidak menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atau menetapkan Hak Guna Usaha (HGU) pada lokasi tersebut, sampai berakhirnya masa berlaku penetapan areal rimba atau gupung sebagai areal konservasi di Areal Penggunaan Lain (APL).

Selain itu, terdapat Peraturan Bupati No.41 tahun 2024 terkait Pemerintahan Kolaboratif yang telah disahkan oleh Bupati Sintang dr. H. Jarot Winarno, M.Med.Ph, yang juga Ketua Umum LTKL. Perbup ini menjadi payung hukum kerjasama multipihak di Kabupaten Sintang yang meli-

batkan lima unsur atau pentahelix; pemerintah, masyarakat sipil, komunitas, pelaku usaha, tenaga ahli dari universitas, dan media.

Deddy Irawan, Sekretaris Badan Bappeda Kabupaten Sintang menjelaskan bahwa Rencana Aksi Daerah (RAD) Sintang Lestari terlaksana di fase Bupati dr. H. Jarot Winarno periode pertama, dan kemudian diintegrasikan ke RPJMD di periode kedua. Dalam pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), ada forum tersendiri yang melibatkan perangkat daerah dan mitra pembangunan Sintang. “Dokumen RPJPD kita sepakat memasukkan visi berkelanjutan, RAD Sintang Lestari sudah kita integrasikan. Kegiatan-kegiatan dengan mitra masyarakat sipil sudah berkolaborasi, dengan membuat satu kesepakatan peran, siapa mengerjakan apa, berikut timeline dan target kapan selesai,” jelas Deddy.

Penjelasan Bappeda ini dikonfirmasi oleh Hendri Ziasmono dari Rainforest Alliance, yang menyatakan bahwa pendekatan lanskap Kabupaten Sintang terlihat dari *political leadership* bupati, yang terhubung satu sama lain. “Di Kabupaten Sintang, penyusunan RPJPD, RPJMD, RPPLH, dan peraturan terkait di bawahnya sudah disusun dengan melibatkan semua pihak. Visi misi yang *clear* dimana visi bersama tersebut diterjemahkan secara integratif dengan rencana aksi bersama di tingkat lanskap, dan terwujud melalui kerja terpadu oleh LSM, masyarakat, perusahaan, dan pemerintah sudah terbangun di *Land-scape Action Plan (LAP)*,” kata Hendri.

Dedi Wahyudi dari WWF menjelaskan bahwa konteks keberlanjutan di Sintang, dari perencanaan, implementasi di beberapa bidang sudah

berjalan dengan baik. “Sudah lengkap, namun masih ada pekerjaan rumah di sisi monitoring evaluasi dan pelaporan serta untuk melihat usaha-usaha inisiatif berkelanjutan ini apa dampaknya bagi Sintang,” tutur Dedi.

Keterlibatan Orang Muda

Laboratorium Bestari dan Semesta Sintang Lestari (SSL) berperan dalam hilirisasi produk melalui dua fungsi utama; inovasi melalui sisi riset dan produksi dari komoditas basis alam. Laboratorium Bestari mengidentifikasi komoditas di Sintang dan manfaat ekologis serta ekonominya. “Produk yang dibuat untuk mengatasi isu-isu ekologis di Sintang. Sementara yang sudah ada kita bergerak di isu kesehatan dengan produk albumin, dan aspek gizi untuk isu stunting. SSL mencoba menjawab dari isu kesehatan di Sintang yang dihubungkan dengan komoditas yang ada di Sintang dan memiliki nilai ekologis,” jelas Mimi dari Lab SSL.

Selain itu juga ada Gemilang yang merupakan sentra inkubasi yang berperan sebagai jembatan yang menghubungkan dengan mitra-mitra yang juga bisa membantu UMKM. Gemilang pernah menyelenggarakan Gemilang Inkubasi Usaha Lestari (Gemari) dengan tujuan mendekatkan peluang pelaku UMKM yang mendukung ekonomi lestari. Pergerakan orang muda ini diimplementasikan dengan semangat mendorong keterlibatan orang muda lokal melalui aksi kolektif.

Gemilang bekerjasama dengan SSL karena Gemilang berfokus pada inkubasi, pendampingan UMKM, dan menghubungkan mereka dengan jejaring mitra potensial, pendanaan, dan akses pasar potensial. “Ada 42 mitra ada di Sekretariat Bersama dan Gemilang salah satu anggotanya. Sudah ada 16 UMKM yang terdiri dari sektor obat herbal, kriya, dan kuliner. Belum banyak gerakan orang muda, dan Gemilang mencoba merangkul orang muda yang ingin melakukan sesuatu untuk Sintang Lestari,” kata Dessy dari Gemilang

Dalam melakukan pelaporan dan pemantauan, Kabupaten Sintang bersama mitra pembangunan menggunakan website resmi Pemkab sintang.go.id sebagai bentuk transparansi data publik dan pemetaan inisiatif mitra pembangunan secara spasial. Pemerintah Kabupaten Sintang juga memberikan apresiasi bagi mitra kabupaten serta pihak swasta yang telah berkontribusi pada pembangunan kabupaten melalui pemberian insentif berupa CSR dan Mitra Pembangunan Awards yang rutin dilakukan setiap tahunnya.

Masing-masing pemangku kepentingan dapat mengisi ruang yang sesuai dengan visi lembaganya. Dengan arahan jelas dari pemerintah kabupaten, kolaborasi terbentuk, bekerjasama dengan berkoordinasi untuk menghasilkan dampak nyata untuk masyarakat yang lebih luas.



